

# Pledoi Sudisman

## POLITBIRO CC PKI

Dalam Statement Politbiro CC PKI menyambut ulangtabun ke-46 Partai, antara lain dinjatakan “Kenjataan bahwa kekuatan<sup>2</sup> kontra-revolusioner dalam waktu singkat telah berhasil memukul dengan menimbulkan kerusakan<sup>2</sup> berat pada PKI, mengharuskan kita jang masih bisa meneruskan perjuangan revolusioner ini untuk melakukan kritik dan otokritik sebagai satu<sup>2</sup>nja tjara jang tepat untuk bisa menamukan kekurangan<sup>2</sup> dan kesalahan<sup>2</sup> baik di bidang teori, politik dan organisasi, dan kemudian memperbaikinja.”

Malapetaka jang telah-mengimbulkan kerugian berat kepada PKI dan gerakan revolusioner Rakjat Indonesia sesudah tardjadi dan gagalnja “Gerakan 30 September” telah menjingkap tabir jang dalam waktu tjukup lama menutupi kelemahan<sup>2</sup> berat PKI. Pimpinan PKI telah mendjalankan avonturisme, jaitu dengan mudah sadja tanpa mengindahkan ketentuan<sup>2</sup> organisasi melibatkan diri ke dalam “Gerakan 30 September” jang tidak berdasarkan kesedaran dan kejakinan jang tinggi massa Rakjat. Dan karena itu telah menjebabkan terpentjilnja Partai dari massa Rakjat. Sebaliknya sesudah kalahnja “Gerakan 30-September” pimpinan Partai mendjalankan garis oportunisme kanan, jaitu menjerahkan nasib Partai dan gerakan revolusioner pada kebidjaksanaan Presiden Sukarno. Ini adalah puntjak kelemahan<sup>2</sup> dan kesalahan<sup>2</sup> berat PKI baik di bidang ideologi, politik dan organisasi.

Politbiro menginsjafi akan tanggung-djawabnja jang paling besar dalam hal kelemahan<sup>2</sup> dan kesalahan<sup>2</sup> berat dalam Partai selama ini. Oleh karena itu Politbiro sangat memperhatikan dan menghargai se-tinggi<sup>2</sup>nja kritik setjara Marxis-Leninis dari kader<sup>2</sup> dan anggota<sup>2</sup> serta kritik<sup>2</sup> setjara djudjur dari simpatisan<sup>2</sup> Partai jang dinjatakan dengan berbagai tjara. Politbiro bertekad untuk melakukan otokritik setjara Marxis-Leninis, mengamalkan ajaran Lenin dan teladan Kawan Musso dalam melakukan kritik otokritik setjara Marxis-Leninis. Lenin mengadjarkan bahwa “Sikap sesuatu

partai politik terhadap kesalahannya sendiri adalah salah satu tjarang penting dan terpertjaja untuk mengukur kesungguhan partai itu dan bagaimana ia dalam praktek menunaikan kewadajiban<sup>2</sup> terhadap klasnya dan Rakjat pekerdja. Terus terang mengakui kesalahan, menjelidiki sebab<sup>2</sup>nja, menganalisa keadaan jang telah menimbulkan, dan dengan teliti mendiskusikan tjara<sup>2</sup> untuk memperbaikinja, itulah tanda suatu partai jang serius; itulah tjara ia harus menundjukkan kewadajiban<sup>2</sup>nja, itulah tjara ia harus mendidik dan melatih klas, dan kemudian massa”<sup>1</sup> (digaris-bawahi oleh Lenin).

Pada bulan Agustus 1948, Kawan Musso telah memberikan teladan dalam Politbiro CC PKI untuk melakukan kritik dan otokritik setjara bebas, setjara Marxis-Leninis terhadap kelemahan<sup>2</sup> dan kesalahan<sup>2</sup> berat PKI selama tahun<sup>2</sup> berlangsungnja Revolusi Agustus 1945. Berkat kritik dan otokritik jang tidak kenal ampun terhadap kelemahan<sup>2</sup> dan kosalahan<sup>2</sup> itu, telah ditemukan djalan keluar jang bertudjuan untuk menegakkan kembali PKI sebagai pelopor klas buruh Indonesia, mengembalikan tradisi baik PKI pada waktu sebelum dan selama Perarig Dunia ke-II dan untuk membikin PKI memperoleh hegemoni dalam pimpinan revolusi.<sup>2</sup>

Perdjungan intern-Partai dalam pembangunan kembali PKI jang menderita pukulan berat dalam “Peristiwa Madiun”. dan pelaksanaan *Djalan Baru* (Resolusi Politbiro CC PKI Agustus 1948) telah melahirkan Politbiro baru pada tahun 1951. Pengalaman sampai dengan terdjadinya “Gerakan 30 September” 1965 menundjukkan, bahwa Politbiro jang dipilih pada tahun 1951, dan jang terpilih kembali oleh CC Partai hasil Kongres Nasional Ke-V dan Ke-VI, bukan sadja tidak berhasil melaksanakan Koreksi Besar Musso, tetapi telah melakukan penyelewengan<sup>2</sup> serius dari Marxisme-Leninisme. Sebagai akibatnja, PKI tidak dapat memenuhi tugasnja dalam sedjarah, sebagai pelopor klas buruh dan pemimpin perdjungan pembebasan Rakjat Indonesia.

Mengingat beratnja kelemahan dan kesalahan<sup>2</sup> jang melibat seluruh Partai, Politbiro memandang perlu untuk menjusun analisa jang

<sup>1</sup> Lenin, *Komunisme “Sajap Kiri”*, *Penjakit Ke-kanak<sup>2</sup>-an*.

<sup>2</sup> *Djalan Baru Untuk Republik Indonesia* (Resolusi Politbiro, CC PKI, Agustus 1948).

lengkap, supaya setiap anggota Partai dapat mempeladjarinya sebaik<sup>2</sup>nya dan supaya dapat menjegah terulangnya kembali kelemahan<sup>2</sup> dan kesalahan<sup>2</sup> yang sama di masa datang. Tetapi dalam keadaan meradajelannya teror putih yang paling ganas dan paling kedjam dari diktatur militer djendral<sup>2</sup> kanan AD Suharto-Nasution sekarang ini, tidak mudah untuk melakukan kritik dan otokritik se-lengkap<sup>2</sup>nya itu. Untuk menjukupi keperluan yang mendesak, perlu lebih dulu dikemukakan soal<sup>2</sup> yang pokok di bidang ideologi, politik dan organisasi, untuk dijadikan pegangan mempeladjarinya kelemahan<sup>2</sup> dan kesalahan<sup>2</sup> Partai dalam gerakan pembetulan fikiran sekarang ini.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati Politbiro menjadikkan otokritik ini. Politbiro mengharap kepada setiap anggota Partai untuk menganbil bagian aktif dan kritis dalam mendiskusikan kelemahan<sup>2</sup> dan kesalahan<sup>2</sup> pimpinan Partai dan berusaha sekuat tenaga untuk menjempurnakan Otokritik Politbiro CC PKI ini, dengan menarik pelajaran<sup>2</sup> dari pengalamannya masing<sup>2</sup> baik setjara kolektif maupun setjara perorangan. Politbiro mengharap supaya tiap anggota Partai berpegang teguh pada garis “persatuan-kritik-persatuan” dan “menerima pelajaran dari yang sudah<sup>2</sup> supaya lebih waspada di kemudian hari; mengobati penjakit untuk menjelamatkan sisakit,” agar dapat menjapai dua tudjuan, jaitu kedjernihan dalam ideologi dan persatuan diantara kawan<sup>2</sup>”<sup>3</sup> Dengan berpegang teguh pada pedoman yang tepat ini Politbiro yakin bahwa setiap anggota Partai akan mengambil bagian dalam gerakan mempeladjarinya dan mengatasi kelemahan<sup>2</sup> serta kesalahan ini dengan tekad untuk membangun kembali PKI yang Marxis-Leninis, memperkuat persatuan dan solidaritet Komunis, mempertinggi kewaspadaan ideologi, politik dan organisasi serta mempertinggi semangat djuang untuk menjapai kemenangan.

## POKOK<sup>2</sup> KELEMAHAN<sup>2</sup> DI BIDANG IDEOLOGI

Resolusi Djalan Baru dalam menjunjukkan sebab utama kesalahan<sup>2</sup> prinsipil di lapangan organisasi dan politik PKI dalam

<sup>3</sup> Mao Tjetung, Laporan Pada Sidang Pleno Ke-7 CC Ke -VI PKT, 1945 (Tjatanan Penerbit: Sumber dari kutipan tersebut adalah Mao Tjetung, *Peladjaran Kita Dan Situasi Dewasa ini*, pidato Kawan Mao Tjetung di depan rapat kader tinggi di Jenan, tanggal 12 April 1944)

masa Revolusi Agustus mengatakan:

“Politbiro berpendapat, bahwa kesalahan<sup>2</sup> prinsipil tsb di atas terutama disebabkan karena lemahnja ideologi Partai.”

Kelemahan<sup>2</sup> dan kesalahan<sup>2</sup> berat jang diderita oleh Partai dalam periode sesudah tahun 1951 tidak bisa tidak djuga bersumber pada kelemahan<sup>2</sup> ideologi, terutama pada pimpinan Partai. Kelemahan ideologi ini bersumber dari asal klas burdjuis ketjil dan kurangnya menguasai Marxisme-Leninisme. Lenin mengadjarkan, buhwa “tanpa teori revolusioner tak mungkin ada gerakan revolusioner,” dan bahwa “peranan pedjuang pelopor itu dapat dilakukan hanja oleh partai jang berpedoman kepada teori jang paling madju.”<sup>4</sup> Pengalaman kaum Komunis Indonesia membenarkan sepenuhnyaj adjaran Lenin itu. Kelemahan<sup>2</sup> dan kesalahan<sup>2</sup> berat jang telah menjebabkan PKI tidak dapat memenuhi tugasnja sebagai pelopor klas buruh Indonesia, oleh karena pimpinan Partai bukan sadja tidak berhasil memadukan teori revolusioner dengan praktek kongkrit revolusi Indonesia, tetapi bahkan telah menempuh djalan jang terlepas dari pedoman teori jung paling madju. Pengalaman itu menundjukkan bahwa PKI belum berhasil memperoleh pimpinan inti jang terdiri dari elemen<sup>2</sup> proletar, jang sungguh<sup>2</sup> memiliki pengertian jang se-tepat<sup>2</sup>nja tentang Marxisme-Leninisme, pengertian jang sistimatis dun tidak sepotong<sup>2</sup>, pengertian jang praktis dan tidak abstrak.

Partai kita mempunjai kelemahan<sup>2</sup> ideologi jang mempunjai akar sedjarah jang lama, jaitu subjektivisme. Dasar sosial ideologi subjektivisme adalah klas burdjuis ketjil. Indonesia adalah negeri burdjuis ketjil, dimana perusahaan<sup>2</sup> pemilik ketjil sangat banjak, terutama pertanian perorangan. Partai kita dilingkung oleh klas burdjuis ketjil jang sangat besar, dan banjak anggota Partai berasal dari klas ini. Tidak bisa tidak fikiran<sup>2</sup> dan kebiasaan<sup>2</sup> burdjuis ketjil terbawa masuk ke dalam Partai. Metode berfikir burdjuis ketjil adalah subjektif berat sebelah dalam menindjau masalah<sup>2</sup>. Tidak bertolak dari kenjataan objektif, dari imbangan kekuatan klas<sup>2</sup> jang objektif, tetapi dari kemauan subjektif, perasaan subjektif dan angan<sup>2</sup> subjektif. Subjektivisme inilah jang mendjadi sumber ideologi kesalahan<sup>2</sup> dogmatisme atau empirisisme di bidang teori,

<sup>4</sup> Lenin, *Apa Jang Harus Dikerdjakan?*

oportunisme kanan atau oportunisme “kiri” di bidang politik dan liberalisme atau sektarisme di bidang organisasi, jang pernah terdjadi dalam Partai kita.

Dalam masa pelaksanaan *Djalan Baru* terdjadi perdjjuangan dalam Partai kita melawan subjektivisme. Akan tetapi perdjjuangan itu ternjata belum berhasil mentjabut sampai keakar<sup>2</sup>nya ideologi subjektivisme. Ini terbukti dari pengalaman Kongres Nasional Ke-V Partai. Dalam Kongres ini telah dilakukan kritik jang tadjam terhadap subjektivisme jang merupakan perintang pelaksanaan Resolusi *Djalan Baru*. Tapi bersamaan dengan itu Kongres telah membikin kesalahan jang sama dengan menerima Manifes Pemilihan Umum PKI, jang mengadjukan program untuk membentuk Demokrasi Rakjat melalui Pemilihan Umum. Ini adalah pernjataan dari opor tunisme “kiri” dan kanan sekaligus. Ditinjau dari segi program jang terlalu djauh, melampaui apa jang bisa ditjapai berdasarkan sjarat<sup>2</sup> objektif adalah merupakan kesalahan “kiri”. Tetapi ditinjau dari djalan fikiran bahwa Demokrasi Rakjat akan dapat ditjapai melalui pemilihan umum, djadi setjara damai, adalah merupakan kesalahan kanan.

Dalam periode sesudah tahun 1951, subjektivisme tetap tumbuh, makin lama makin besar dan melahirkan oportunisme kanan jang berpadu dengan pengaruh revisionisme modern jang terdjadi dalam Gerakan Komunis Internasional. Ini merupakan benang hitam oportunisme kanan jang mendjadi tjri pokok kesalahan<sup>2</sup> PKI dalam periode tersebut. Tumbuh dan perkembangan kelemahan<sup>2</sup> serta kesalahan<sup>2</sup> itu oleh karena faktor<sup>2</sup> sebagai berikut:

Pertama, tidak dihidupkannja tradisi kritik dan otokritik setjara Marxis-Leninis di dalam Partai terutama di dalam pimpinan Partai. Salah satu tjontoh adalah mengenai penggantian Manifes Pemilihan Umum PKI. Setelah diketahui bahwa Manifes Pemilihan Umum itu salah, segera ditjabut dan diganti dengan program jang lain, jaitu untuk pemerintah Koalisi Nasional. Tetapi tindakan itu tidak disertai deagan kritik dan otokritik setjara luas dan dalam mengenai sumber ideologi dari kesalahan itu, untuk mendjaga “prestise pimpinan”. Oleh karena itu tindakan mengganti Manifes Pemilihan Umum dengan program untuk Pemerintah Koalisi Nasional masih belum mengikis sikap oportunis menghadapi Pemilihan Umum dalam rangka demokrasi burdjuis. Mengenai soal ini lebih landjut

akan kita kupas di belakang.

Gerakan<sup>2</sup> pembetulan pikiran atau gerakan beladjar jang kadang<sup>2</sup> diadakan oleh Partai kurang dilaksanakan dengan serius dan konsekwen, kurang disimpulkan setjara baik, dan tidak diikuti dengan tindakan<sup>2</sup> organisasi jang diperlukan. Gerakan<sup>2</sup> beladjar lebih banjak ditudjukan kepada bawahan dan boleh dikatakan tidak pernah ditudjukan untuk melakukan kritik dan otokritik di kalangan pimpinan. Kritik dari bawah tidak diberi saluran jang baik, bahkan ditekan.

Tidak dihidupkannya tradisi kritik dan otokritik setjara Marxis-Leninis di dalam Partai, terutama di dalam pimpinan Partai disatu fihak dan lemahnja teori kader<sup>2</sup> Partai pada umumnja difihak lain menumpulkan daja kritik dan kewaspadaan ideologi kader<sup>2</sup> Partai pada umumnja, dan khususnja kader<sup>2</sup> pimpinan.

Kedua, menjusupnja pengaruh ideologi burdjuis jang melalui dua djalan, jaitu pada waktu Partai menggalang front persatuan dengan burdjuis nasional, dan penburdjuisan diri di kalangan kader<sup>2</sup> terutama pimpinan setelah mendapatkan kedudukan<sup>2</sup> di dalam lembaga<sup>2</sup> pemerintahan dan semi-pemerintah. Makin banjarknja kader<sup>2</sup> Partai duduk dalam lembaga<sup>2</sup> pemerintahan-dan semi-pemerintah di pusat dan daerah menimbulkan “lapisan kaum buruh jang diburdjuiskan” dan ini merupakan “saluran<sup>2</sup> jang sebenarnya bagi reformisme.”<sup>5</sup> Keadaan demikian itu tidak terdapat pada masa sebelum Revolusi Agustus 1945.

Ketiga, revisionisme modern mulai menjusup ke dalam Partai ketika setjara tidak kritis Sidang Pleno Ke-IV CC Kongres Ke-V menerima laporan jang membenarkan garis Kongres Ke-20 PKUS dan mendjadikan garis “meatjapai sosialisme setjara damai melalui djalan parlementer” sebagai garis PKI. Djalan damai sebagai salahsatu tjiri revisionisme modern ini telah lebih dipakukan lagi dalam Kongres Nasional Ke-VI PKI dengan ditjantumkannja dalam Konstitusi Partai kata<sup>2</sup> bahwa “adalah suatu kemungkinan bahwa sistim Demokrasi Rakjat sebagai tingkat peralihan ke sosialisme di Indonesia ditjapai dengan djalan damai, djalan parlementer. PKI dengan sekuat tenaga berdjjuang untuk

<sup>5</sup> Lenin, *Imperialisme Tingkat Tertinggi Kapitalisme*.

mendjadikan kemungkinan ini suatu kenjataan”. Garis revisionis ini bahkan diperkuat kembali dalam Kongres Nasional PKI ke-VII dan tidak pernah dikoreksi, walaupun ketika itu Partai kita sudah sadar bahwa pimpinan PKUS sedjak Kongres Ke-20 telah menempuh djalan revisionisme modern.

Dalam menghadapi revisionisme modern pimpinan PKUS, pimpinan PKI jang sudah sangat terikat oleh persekutuan dengan burdjuasi nasional, telah mengambil sikap jang tidak tegas. Sikap itu diambil terutama dari segi menjelamatkan kepentingan persekutuannya dengan burdjuasi nasional dan bukan dari segi kepentingan jang jelas dari proletariat. Meskipun pada tahun<sup>2</sup> belakangan pimpinan PKI mengetjam berbagai garis revisionisme modern pimpinan PKUS, dan dari sikapnja ini PKI mendapat tempat terhormat dalam barisan kaum Marxis-Leninis sedunia, tetapi masih tetap memelihara hubungan baik dengan pimpinan PKUS, dan pengaruh revisionisme dalam Partai tidak dikikis sama sekali.

Pengalaman PKI memberikan peladjaran bahwa sikap mengetjam revisionisme modern PKUS tidak berarti bahwa PKI sendiri otomatis sudah bebas dari kesalahan<sup>2</sup> oportuniste kanan jang sama dengan jang dilakukan oleh kaum revisionis modern. Pengalaman PKI memberi peladjaran bahwa revisionisme modern, bahaja terbesar dari Gerakan Komunis Internasional, adalah djuga bahaja terbesar bagi PKI. Revisionisme modern bukan “bahaja jang laten tetapi tidak akut,”<sup>6</sup> melainkan bahaja jang kongkrit dan telah menimbulkan kerusakan<sup>2</sup> berat pada PKI dan menimbulkan kerugian besar bagi gerakan revolusioner Rakjat Indonesia. Oleh karena itu sama sekali tidak boleh meremehkan bahaja revisionisme modern dan harus dilakukan perdjjuangan tak kenal ampun terhadapnya. Sikap tegas melawan revisionisme moden di segala bidang hanja dapat dilakukan setjara efektif apabila Partai kita meninggalkan garis “memelihara persahabatan dengan kaum revisionis modern.”

Adalah satu kenjataan bahwa PKI disatu fihak mengetjam revisionisme modern pimpinan PKUS, tetapi difihak lain djuga mendjalankan kesalahan<sup>2</sup> revisionis, karena merevisi adjaran<sup>2</sup>

<sup>6</sup> D.N. Aidit, *Djadilah Komunis Jang Baik, Dan Lebih Baik Lagi*.

Marxisme-Leninisme tentang perjuangannya kelas, negara dan revolusi. Selain itu, pimpinan PKI bukan saja tidak mengadakan perjuangan di bidang teori terhadap aliran<sup>2</sup> revolusioner lain yang bisa menjesatkan proletariat seperti yang diadajarkan oleh Lenin,<sup>7</sup> tetapi malahan setjara sukarela memberikan konsesi<sup>2</sup> teori. Pimpinan PKI telah menjamakan tiga komponen Marxisme, jaitu materialisme filsafat, ekonomi politik dan sosialisme ilmu, dengan “tiga komponen ajaran Bung Karno”; hendak mendjadikan Marxisme sebagai ideologi kelas buruh milik nasion yang di dalamnja terdapat kelas<sup>2</sup> penghisap yang bermusuhan dengan kelas buruh.

## POKOK<sup>2</sup> KESALAHAN DI BIDANG POLITIK

Kesalahan<sup>2</sup> oportunisme kanan di bidang politik yang kita tindjau ini meliputi tiga persoalan, jaitu (1) djalan untuk mentjapai Demokrasi Rakjat Indonesia, (2) masalah kekuasaan negara dan (3) pelaksanaan front persatuan nasional.

Oportunisme kanan di bidang politik, menampakkan dirinya pertama-tama dan terutama mengenai djalan damai atau djalan revolusi untuk mentjapai Demokrasi Rakjat di Indonesia sebagai tingkat peralihan ke sistim sosialis. Salah satu perbedaan dan pertentangan azasi antara Marxisme-Leninisme dengan revisionisme baik klasik maupun modern adalah djustru terletak pada soal djalan mentjapai sosialisme. Marxisme-Leninisme mengadajarkan mentjapai sosialisme melalui djalan revolusi proletar dan untuk negeri<sup>2</sup> djadjahan, setengah djadjahan dan setengah feodal seperti Indonesia melalui Revolusi Demokrasi Rakjat lebih dulu. Sedangkan revisionisme mengchajalkan djalan damai.

Bagaimanakah proses terdjadi dan berkembangnja kesalahan mengenai soal ini?

Selama masa 15 tahun sedjakk tahun 1951, PKI telah menempuh perjuangan legal dan parlementer. Menggunakan bentuk perjuangan legal dan parlementer adalah salah satu tjara yang harus digunakan oleh partai proletariat revolusioner dalam keadaan dan sjarat tertentu sebagaimana didjelaskan oleh Lenin dalam karjanja *Komunisme “Sajap Kiri” Penjakit Ke-kanak<sup>2</sup>an*. Menolak

<sup>7</sup> Lenin, *Apa Jang Harus Dikerdjakan?*



menggunakan bentuk perjuangan parlementer pada saat perjuangan itu diperlukan, dan bermain dengan revolusi ketika sjarat<sup>2</sup>nja belum tersedia, adalah salah.

Perjuangan parlemeater sebagai bentuk perjuangan legal jang dilakukan oleh Partai pada tahun 1951 pada pokoknja adalah benar, sesuai dengan sjarat<sup>2</sup> objektif pada waktu itu. Keadaan objektif waktu itu jalah bahwa gelombang revolusi sedang surut, tenaga<sup>2</sup> penggerak revolusi belum bangkit kembali, bagian besar Rakjat jang sebelum Revolusi Agustus belum pernah mengalami kemerdekaan politik masih menaruh harapan pada demokrasi burdjuis.

Pada tahun<sup>2</sup> permulaan periode tersebut Partai mentjapai hasil<sup>2</sup> tertentu dalam perjuangan politik maupun dalam pembangunan Partai. Hasil jang penting dalam masa itu jalah dirumuskannja soal<sup>2</sup> pokok revolusi Indonesia. Telah dirumuskan bahwa revolusi Indonesia tingkat sekarang adalah revolusi burjuis demokratis tipe baru, jang tugasnja melikwidasi imperialisme dan sisa<sup>2</sup> feodalisme serta membangun sistim Demokrasi Rakjat sebagai tingkat peralihan ke sosialisme. Tenaga<sup>2</sup> penggerak revolusi adalah klas buruh, kaum tani dan burdjuis ketjil, tenaga pimpinannja jalah klas buruh dan kekuatan massa utamanja jalah kaum tani. Telah dirumuskan pula bahwa burdjuasi nasional adalah kekuatan revolusi jang bimbang, jang dalam batas<sup>2</sup> tertentu dan pada waktu tertentu bisa memihak revolusi, tetapi pada waktu jang lain bisa mengchianati revolusi. Partai djuga telah merumuskan bahwa klas buruh, untuk dapat memenuhi kewadajibannja sebagai pemimpin revolusi Indonesia harus menggalang front persatuan revolusioner dengan semua klas dan golongan revolusioner lainnja, atas dasar persekutuan buruh dan tani di bawah pimpinan klas buruh.

Tetapi, suatu kekurangan jang sangat penting, jang di kemudian hari merupakan penjelewengan oportuniste kanan atau revisionisme, jalah, bahwa Partai belum mentjapai persatuan fikiran jang se-djernih<sup>2</sup>nja mengenai usaha<sup>2</sup> pokok, bentuk perjuangan pokok revolusi Indonesia. CC Partai pernah mendiskusikan masalah ini setjara garis besar, tetapi untuk waktu<sup>2</sup> selandjutnja tidak pernah membitjarakan setjara mendalam sehingga memungkinkan ditjapainja pengertian tunggal jang setepat<sup>2</sup>nja, sebagai sjarat untuk ditjapainja pengertian tunggal dan tepat di

seluruh Partai.

Adalah suatu kesalahan besar bagi suatu partai yang memikul tugas sedjarah memimpin revolusi seperti PKI, tidak menjadikan masalah usaha<sup>2</sup> pokok, bentuk perjuangan pokok revolusi Indonesia sebagai persoalan seluruh Partai, melainkan hanya persoalan sebagian ketjil di kalangan pimpinan dan kader<sup>2</sup> tertentu Partai. Dengan demikian fikiran majoritet dalam Partai telah dipasifkan mengenai masalah yang maha penting bagi revolusi itu.

Revolusi Indonesia, walaupun pimpinannya adalah kelas buruh, tetapi massanya yang terutama adalah kaum tani. Karena ketjilnya jumlah kelas buruh Indonesia, maka metode<sup>2</sup> perjuangan kelas buruh yaitu pemogokan umum yang merupakan pelopor kebangkitan tenaga<sup>2</sup> penggerak revolusi lainnya yang kemudian meningkat ke pemberontakan bersenjata, seperti yang terjadi dalam revolusi burdjuis demokratis Rusia 1905,<sup>8</sup> tidak dapat menjadi bentuk perjuangan pokok atau metode revolusi Indonesia.

Revolusi Tiongkok telah memberikan pelajaran tentang bentuk perjuangan pokok revolusi di negeri djadjaan, setengah djadjaan dan setengah feodal, yaitu perjuangan Rakjat bersenjata melawan kontra revolusi bersenjata. Sesuai dengan hakekat revolusi adalah revolusi agraria, maka hakekat perjuangan Rakjat bersenjata itu adalah perjuangan bersenjata kaum tani dalam revolusi agraria dibawah pimpinan kelas buruh. Praktek revolusi Tiongkok pertamanya adalah merupakan pentrapan Marxisme-Leninisme berdasar kondisi<sup>2</sup> kongkrit Tiongkok. Bersamaan dengan itu ia juga mengungkapkan hukum umum bagi revolusi<sup>2</sup> Rakjat di negeri<sup>2</sup> djadjaan, setengah djadjaan dan setengah feodal.

Revolusi Indonesia, untuk sampai kepada kemenangan yang penuh, harus juga menempuh jalan revolusi Tiongkok. Ini berarti bahwa revolusi Indonesia tak terelakkan harus menjalankan bentuk pokok perjuangan Rakjat bersenjata melawan kontra revolusi bersenjata, yang hakekatnya adalah revolusi agraria bersenjata kaum tani dibawah pimpinan proletariat.

<sup>8</sup> Lenin, Kuliah Tentang Revolusi 1905.

Revolusi agraria jang mendjadi hakekat revolusi Indonesia tingkat sekarang, bukanlah reform agraria model burdjuasi jang hanja membuka djalan bagi perkembangan kapitalisme di desa. Revolusi ini akan membebaskan buruh-tani, tani-miskin dan tani sedang dari penindasan feodal tuan-tanah asing maupun pribumi dengan mensita tanah tuan-tanah dan membagikannja setjara tjuma<sup>2</sup> kepada buruh-tani dan tani-miskin orang seorang sebagai hak milik perseorangan. Revolusi demikian hanja bisa menang djika dilakukan dengan bersendjata dibawah pimpinan klas buruh. Revolusi ini tidak dapat dipaksakan dari luar. Ia akan terdjadi berdasarkan kesedaran dan kejakinan jang tinggi dari kaum tani, jang diperolehnja berkat perngalaman perdjjuangan mereka sendiri dan pendidikan klas buruh.

Djelaslah bahwa dalam keadaan sjarat<sup>2</sup> revolusi belum tersedia kewadajiban PKI baik melalui pekerdjaan politik, pekerdjaan agitasi-propaganda dan pekerdjaan organisasi harus mendidik seluruh anggota, klas buruh dan kaum tani mengenai bentuk perdjjuangan pokok revolusi Indonesia itu. Segala bentuk pekerdjaan legal dan parlementer harus diabdikan kepada usaha<sup>2</sup> atau bentuk perdjjuangan pokok itu dan sama sekali tidak boleh merintangji proses mematangnja perdjjuangan bersendjata.

Pengalaman selama 15 tahun jang lalu, memberi peladjaran bahwa dimulai dari tidak tegas<sup>2</sup> menjangkal djalan damai dan kurang berpegang teguh pada hukum umum revolusi di negeri<sup>2</sup> djadjahan, setengah djadjahan dan setengah feodal, PKI makin lama makin tenggelam dalam perdjjuangan parlementer dan bentuk<sup>2</sup> perdjjuangan legal lainnja. Pimpinan Partai bahkan telah mendjadikan bentuk<sup>2</sup> perdjjuangan itu sebagai bentuk pokok perdauangan untuk mentjapai tudjuan strategi revolusi Indonesia. Legalitet Partai bukan dipandang sebagai salah satu tjara perdjjuangan pada waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu, tetapi didjadikan prinsip dan bentuk<sup>2</sup> perdjjuangan lain<sup>2</sup>nja harus mengabdikan pada prinsip itu. Sampaipun ketika kontra-revolusi bukan sadja sudah merampas legalitet Partai, tetapi djuga sudah merampas hak<sup>2</sup> kemanusiaan orang<sup>2</sup> Komunis, "legalitet" itu masih hendak dipertahankan dengan sekuat tenaga.

<sup>9</sup> D.N. Aidit, *Laporan pada Sidang Pleno ke-2 CC Kongres Ke-VI PKI*.

Seperti telah disebutkan di muka, “djalan damai” mulai dipakukan dalam Partai ketika Sidang Pleno Ke-IV CC PKI (1956)<sup>9</sup> mensahkan dokumen jang menerima garis revisionisme modern Kongres Ke-20 PKUS. Dalam keadaan garis revisionisme sudah dipakukan ke dalam Partai tidaklah mungkin ada garis strategi dan taktik jang tepat, jang Marxis-Leninis. Perumusan garis strategis dan taktik<sup>2</sup> pokok Partai, dimulai dengan kekaburan antara “djalan damai” atau “djalan revolusi bersendjata”, jang dalam proses perkembangan achirnja “djalan damai” jang berkuasa.

Dalam sjarat<sup>2</sup> demikian itulah dirumuskan Garis Umum PKI melalui Kongres Nasional Ke-VI (1959), jaitu “meneruskan penggalangan front persatuan Nasional dan meneruskan Pembangunan Partai untuk menjelesaikan tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945.” Berdasarkan garis umum Partai itu ditetapkan sembojan “Mengibarkan Tripandji Partai,” jaitu (1) Pandji Front Nasional, (2) Pandji Pembangunan Partai dan (3) Revolusi Agustus 1945. Garis umum tersebut dimaksudkan sebagai djalan menudju Demokrasi Rakjat Indonesia.

Pimpinan Partai berusaha untuk mendjelaskan bahwa Tripandji Partai berarti tiga sendjata utama untuk memenangkan Revolusi Demokrasi Rakjat jang seperti dikemukakan oleh Kawan Mao Tjetung adalah “suatu Partai jang berdisiplin baik dipersendjatai dengan teori Marxisme-Leninisme, menggunakan metode otokritik dan erat berhubungan dengan massa Rakjat; suatu tentara dibawah pimpinan Partai, jang sedemikian itu; suatu front persatuan dari semua klas dan golongan revolusioner dibawah pimpinan Partai jang sedemikian.”<sup>10</sup>

Sendjata utama kedua berarti perdjjuangan Rakjat bersendjata melawan kontrarevolusi bersendjata dibawah pimpinan Partai. Ini hendak diganti oleh pimpinan Partai dengan sembojan “mengibarkan Pandji Revolusi Agustus 1945”. Memang didjelaskan bahwa “Pandji Revolusi Agustus memakukan arti penting dari penggunaan pengalaman<sup>2</sup> perdjjuangan selama Revolusi Agustus 1945” dan “bahwa dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia adalah sangat penting rol dari peperangan

<sup>10</sup> Mao Tjetung, *Pilihan Tulisan*<sup>2</sup>. Edisi Inggris Djilid IV.

<sup>11</sup> D.N. Aidit, *Kibarkan Tinggi<sup>2</sup> Pandji Revolusi*.

gerilja,”<sup>11</sup> akan tetapi dalam praktek tidak ada usaha kedjurusan itu.

Untuk membuktikan bahwa djalan jang ditempuh bukan “djalan damai” jang oportunis itu, pimpinan Partai selalu mengatakan tentang adanja dua kemungkinan, jaitu kemungkinan djalan damai dan kemungkinan djalan tidak damai; dan bahwa makin baik Partai bersiap menghadapi kemungkinan djalan tidak damai, makin terbuka kemungkinan djalan damai. Tetapi perkataan<sup>2</sup> demikian itu sebenarnja djustru menundjukkan adanja dualisme mengenai djalan jang ditempuh oleh pimpinan Partai. Dengan demikian kepada anggota<sup>2</sup> Partai, klas buruh dan massa Rakjat pekerdja selalu ditanamkan harapan akan djalan damai jang sebenarnja tidak ada.

Dalam praktek pimpinan Partai bukannya mempersiapkan seluruh barisan Partai, klas buruh dan massa Rakjat menghadapi kemungkinan djalan tidak damai. Bukti jang sedjelas<sup>2</sup>nja adalah tragedi jang paling menjedihkan sesudah terdjadi dan gagalnja “Gerakan 30 September”. Dalam waktu singkat kontra-revolusi telah dapat membunuh dan menangkap ratusan ribu orang<sup>2</sup> Komunis dan orang<sup>2</sup> revolusioner non-Komunis dalam keadaan pasif, serta melumpuhkan organisasi PKI dan ormas<sup>2</sup> revolusioner. Keadaan demikian pasti tidak akan terdjadi seandainja pimpinan Partai tidak menjimpang dari djalan revolusi.

Pimpinan Partai mengemukakan bahwa “Partai tidak boleh mendjiplak teori perdjjuangan bersendjuta di luar negeri, tetapi harus mendjalankan Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perdjjuangan (MKTBP),<sup>12</sup> jaitu: perdjjuangan gerilja di desa (terutama terdiri dari buruh-tani dan tani-miskin); aksi<sup>2</sup> revolusioner oleh kaum buruh (terutama buruh transport) di kota<sup>2</sup>, dan pekerdjaan intensif di kalangan kekuatan bersendjata musuh”. Pimpinan Partai mengkritik sementara kawan, karena dianggapnja dalam beladjar dari pengalaman perdjjuangan bersendjata Rakjat Tiongkok hanya melihat persamaannja. Sebaliknya pimpinan Partai mengemukakan perbedaan<sup>2</sup> sjarat jang harus diperhitungkan sehingga kesimpulannja jalah bahwa metode jang khas bagi revolusi Indonesia adalah “MKTBP.”

<sup>12</sup> D.N. Aidit, *Kibarkan Tinggi<sup>2</sup> Pandji Revolusi*.

Menggunakan pengalaman negeri<sup>2</sup> lain setjara dogmatis adalah salah. Tetapi menolak menggunakan menggunakan pengalaman negeri lain jang telah terudji kebenarannya sebagai salah satu teori revolusi Rakjat adalah djuga salah. Lenin mengadajarkan bahwa “suatu gerakan jang mulai di sebuah negeri jang muda dapat berhasil baik hanja djika ia mengolah pengalaman negeri<sup>2</sup> lain setjara kritis dan mengudjinja setjara bebas.”<sup>13</sup>

Kenjataan membuktikan bahwa “teori MKTBP” bukan hasil pengolahan pengalaman setjara kritis dari negeri lain jang dipadu dengan praktek kongkrit Indonesia, sehingga merupakan salah satu teori revolusi jang chas Indonesia. Revolusi Rusia tahun 1905 seperti diterangkan oleh Lenin dalam Kuliah Tentang Revolusi 1905 adalah merupakan kombinasi dari pemogokan<sup>2</sup> kaum buruh, perdjuangan anti feodal kaum tani di desa<sup>2</sup> dan pemberontakan tentara, dengan pemogokan buruh sebagai pelopornja. Revolusi Tiongkok djuga mengkombinasikan perang agraria revolusioner, pekerdjaan di desa<sup>2</sup> dan kota<sup>2</sup> jang diduduki oleh musuh dan pekerdjaan dalam kekuatan bersendjata musuh, dengan perang agraria revolusioner sebagai bentuk pokoknja.

“Tiga bentuk perdjuangan” jang harus dikombinasi, masing<sup>2</sup> dipimpin bukan menuruti djalan revolusi, tetapi menuruti “djalan damai.” Perdjuangan kaum tani untuk melawan penghisapan dan penindasan sisa<sup>2</sup> feodalisme, apabila mendapat pimpinan jang tepat tidak bisa tidak pasti berkembang ke arah bentuknja jang tertinggi jaitu revolusi agraria untuk membebaskan kaum tani dari penindasan tuan-tanah. Perdjuangan ini hanja mungkin mentjapai kemenangan sempurna apabila dilakukan dengan bersendjata dibawah pimpinan PKI. Tetapi pimpinan Partai tidak memusatkan pimpinannya ke arah perkembangan perdjuangan tani jang semakin tinggi dan mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan jang bisa terdjadi.

Ketika mulai ada kebangkitan aksi<sup>2</sup> sefihak kaum tani jang langsung melawan tuan-tanah pribumi, bukannya dikembangkan ke arah bentuknja jang lebih tinggi, tetapi telah dibelokkan dengan melantjarkannya berbagai gerakan lainnja jang tidak bersifat melawan tuan-tanah, seperti Gerakan Kebudayaan Baru (GKB),

<sup>13</sup> Lenin, *Apa Jang Harus Dikerdjakan?*

Gerakan 1001 Dan Naik Produksi dan Gerakan Membasmi Tikus. Sudah tentu bagi gerakan tani revolusioner tidak salah untuk melantarkan kegiatan menaikkan produksi, membasmi hama dan menaikkan taraf kebudayaan kaum tani. Tetapi semua ini harus mengabdikan tujuan pokok gerakan tani revolusioner, yaitu revolusi agraria anti feodal. Oleh karena itu tidak semestinya dinilai demikian tingginya sehingga membelokkan arah gerakan tani revolusioner menjadi gerakan reformis.

Di kota, walaupun penderitaan hidup kaum buruh makin berat, tetapi karena tidak mendapatkan pimpinan yang semestinya, aksi<sup>2</sup> kaum buruh yang mempunyai arti politik makin lama makin berkurang. Memang pernah terjadi aksi<sup>2</sup> kaum buruh yang kelihatannya besar dan mempunyai arti politik penting, yaitu pengambilalihan perusahaan<sup>2</sup> Belanda, Inggris dan Belgia. Tetapi hasil yang sebenarnya dari aksi itu hanya memberikan keuntungan kepada segelintir kaum kabir, dan tidak memperbaiki sama sekali kehidupan kaum buruh yang bersangkutan. Ketjujali itu karena pimpinan Partai memandang bahwa perusahaan<sup>2</sup> imperialis yang dikuasai oleh pemerintah RI sebagai milik nasional, maka aksi<sup>2</sup> kaum buruh selanjutnya telah ditekan. Sebaliknya banyak dilakukan kegiatan baik oleh Sarekat Buruh setjara langsung maupun melalui Dewan<sup>2</sup> Perusahaan yang ditunjukkan untuk memperbesar produksi, menjehtakan djawatan, memperbaiki ekonomi dll yang tidak memperbaiki nasib kaum buruh dan tidak mempertinggi semangat revolusioner kaum buruh.

Berpangkal pada pendirian yang salah bahwa "Angkatan Bersendjata RI bukanlah angkatan bersendjata yang reaksioner,"<sup>14</sup> maka soal "bekerja di kalangan kekuatan bersendjata musuh" diartikan sebagai "mengintegrasikan alat<sup>2</sup> negara yang penting dengan Rakjat," atau "mengeratkan hubungan dwitunggal Rakjat dan Angkatan Bersendjata." Ini berarti mengintegrasikan alat kekerasan kelas<sup>2</sup> penindas dengan kelas<sup>2</sup> tertindas. Kesalahan demikian terjadi karena pimpinan Partai mengingkari ajaran Marxisme-Leninisme tentang negara, memandang RI bukan negara burdjuis dan Angkatan Bersendjata RI bukan alat negara burdjuis. Pimpinan Partai melupakan kenyataan bahwa Angkatan Bersendjata RI setjara keseluruhan, walaupun dilahirkan oleh Revolusi Agustus, tetapi

<sup>14</sup> D.N. Aidit, *Kibarkan Tinggi<sup>2</sup> Pandji Revolusi*.

sedjak revolusi itu gagal dan kekuasaan negara djatuh sepenuhnya di tangan burdjuis reaksioner, dengan sendirinja mendjadi alat kekuasaan klas jang menguasai negara itu. Asal klas dari para bintang dan terutama jang banjak dari anak<sup>2</sup> kaum buruh dan kaum tani memang dapat merupakan elemen jang memihak Rakjat. Tetapi hal ini tidak mengubah kedudukan angkatan bersendjata setjara keseluruhan sebagai alat negara jang mengabdikan kepentingan klas jang berkuasa.

Untuk memenuhi tugas sedjarahnja jang besar, berat, tetapi mulia, jaitu memimpin revolusi Rakjat anti-imperialisme, anti-feodalisme dan anti kapitalisme birokrasi, kaum Marxis-Leninis Indonesia harus tegas meninggalkan djalan damai jang revisionis itu, meninggalkan”teori MKTBP” dan mengibarkan tinggi<sup>2</sup> pandji revolusi Rakjat bersendjata. Seperti djuga pengalaman revolusi Rakjat Tiongkok jang djaja, kaum Marxis-Leninis Indonesia harus menggalang daerah basis revolusioner; mereka harus “membangun desa<sup>2</sup> jang terbelakang mendjadi daerah basis jang madju, terkonsolidasi, mendjadi benteng<sup>2</sup> revolusioner jang besar setjara militer, politik, ekonomi dan kebudajaan.”<sup>15</sup>

Bersamaan dengan mengurus masalah jang paling pokok ini, kita harus pula melakukan bentuk<sup>2</sup> perdjjuangan jang lain; perdjjuangan bersendjata tidak akan madju djika tidak dikoordinasi dengan bentuk<sup>2</sup> perdjjuangan lainnja.

o o o o o o o

Garis oportuniste kanan pimpinan Partai djuga ditjerminkan dalam sikapnja mengenai negara, chususnja negara RI. Marxisme-Leninisme mengadakan bahwa “negara adalah suatu alat kekuasaan klas, suatu alat untuk menindas klas jang satu oleh klas jang lainnja”; bahwa “bentuk<sup>2</sup> negara burdjuis sungguh sangat bermatjam-ragam, tetapi hakekatnja adalah sama ..... diktatur burdjuasi” dan bahwa “penggantian negara burdjuis oleh negara proletar” (di Indonesia melalui negara Demokrasi Rakjat - Politbiro) “tidak mungkin-tanpa revolusi kekerasan”<sup>16</sup>

Berdasarkan adjaran Marxisme-Leninisme tentang negara itu, maka

<sup>15</sup> Mao Tjetung, *Revolusi Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok*, Edisi Inggris.

<sup>16</sup> Lenin, *Negara dan Revolusi*.



sedjak gagalnja Revolusi Agustus 1945, tugas PKI seharusnya mendidik klas buruh dan Rakjat pekerdja lainnja bahwa perjuangan untuk kebebasan mereka tak terelakkan akan sampai kepada keharusan “penggantian negara burjuasi” oleh negara Rakjat dibawah pimpinan klas buruh, melalui “revolusi kekerasan”. Tetapi pimpinan PKI telah mendjalankan garis oportunis jang menimbulkan ilusi di kalangan Rakjat terhadap demokrasi burdjuis. Perkembangan garis oportunis mengenai negara itu adalah sebagai berikut:

Dalam rangka mendjalankan taktik menarik kembali burdjuasi nasional ke dalam front persatuan nasional, PKI telah menjokong pemerintah Wilopo (permulaan tahun 1952) dan pemerintah<sup>2</sup> RI sesudah pemerintah Wilopo ketjuali pemerintah Burhanudin Harahap dari Masjumi - jang programnja agak madju. Dengan sikapnja itu PKI dapat menarik burdjuasi nasional dalam front persatuan dan mentjegah terbentuknja pemerintah reaksioner. Tetapi dalam kelandjutannja PKI telah mendjalankan praktek jang meninggalkan kedudukannja sebagai partai proletar jang bebas terhadap pemerintah burdjuasi. PKI telah tidak menunaikan tugasnja setjara penuh dalam menelandjangi kebangkrutan demokrasi burdjuis. Lebih<sup>2</sup> lagi ketika PKI menggunakan pemilihan umum dan perjuangan parlementer bukan untuk mempertjepat keusangan parlementerisme setjara politik, tetapi malahan memperkuat parlementerisme.

PKI menghadapi pemilihan umum parlemen jang pertama dengan program untuk membentuk pemerintah Koalisi Nasional, jaitu suatu pemerintah front persatuan dari elemen<sup>2</sup> demokratis termasuk kaum Komunis. Dengan programnja untuk pemilihan unum itu, PKI mendjalankan kesalahan seperti jang dilakukan oleh kaum demokrat burdjuis ketjil dan oportunis, jang oleh Lenin dikatakan “mendesakkannja kepada Rakjat faham jang salah bahwa pemilihan umum di dalam negara modern” (batja di dalam negara burdjuis - Politbiro) “benar<sup>2</sup> dapat menentukan kehendak majoritet dari Rakjat pekerdja dan mendjamin pelaksanaannja”<sup>17</sup>

Tuntutan pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional mendjadi program tuntutan PKI, jang kemudian mendapat bentuk pada

<sup>17</sup> Lenin, *Negara dan Revolusi*.

tuntutan pembentukan Kabinet Gotong Rojong berporoskan Nasakom. Dengan mendjadikan pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional sebagai tuntutan politik terpenting, telah menanamkan ilusi bahwa dibawah kekuasaan diktatur burdjuasi tanpa adanja kekuatan bersendjata dibawah pimpinan Partai, mungkin dilahirkan suatu pemerintah front persatuan dari elemen<sup>2</sup> demokratis termasuk kaum Komunis sesuai dengan rasa keadilan Rakjat, dan jang akan mempermudah tertjapainja tudjuan<sup>2</sup> strategi. Kampanje untuk menuntut Kabinet Gotong Kojong berporoskan Nasakom telah mendesak ke belakang propaganda tentang negara Demokrasi Rakjat, dan dengan dekikian merintangki perkembangan kesedaran revolusioner klas buruh dan Rakjat pekerdja lainnja.

Puntjak penjelewengan pimpinan Partai dari adjaran<sup>2</sup> Marxisme-Leninisme mengenai negara adalah lahirnja”teori dua aspek dalam kekuasaan negara RI. Sesudah lahirnja teori “dua aspek”, maka hanja dalam pemitjaraan mengenai negara setjara umum sadja masih agak dipegang dalil<sup>2</sup> Marxisme-Leninisme. Tetapi dalam membitjarakan soal negara setjara kongkrit, jaitu negara RI, maka dalil<sup>2</sup> Marxisme-Leninisme itu tidak berlaku sama sekali.

“Teori dua aspek” memberikan pandangan mengenai negara dan kekuasaan negara sebagai berikut:

“Susunan ekonomi (basis) masjarakat Indonesia sekarang masih kolonial dan setengah-feodal. Tetapi disamping itu djuga terdapat perdjuangan Rakjat untuk melawan sistem ekonomi tersebut, dan berdjuang untuk ekonomi jang nasional dan demokratis.

“Kenjataan<sup>2</sup> dari basis ini tertjermin djuga dalam bangunan atas, termasuk djuga dalam kekuasaan negara, chususnja dalam kabinet. Dalam kekuasaan negara tertjermin kekuatan jang melawan sistim ekonomi kolonial dam feodal disamping kekuatan jang membela imperialis, sisa<sup>2</sup> feodalisme, kaum kapitalis birokrat dan kaum komprador....

“Kekuasaan negara RI, ditindjau sebagai satu kontradiksi merupakan kontradiksi antara dua aspek jang saling berlawanan. Aspek pertama: aspek jang mewakili

kepentingan<sup>2</sup> Rakjat (diwujudkan oleh sikap dan politik jang maju dari Presiden Sukarno jang didukung oleh PKI dan golongan<sup>2</sup> Rakjat lainnja). Aspek kedua: aspek jang mewakili musuh<sup>2</sup> Rakjat (diwujudkan oleh sikap dan politik dari kekuatan kanan atau kepalabatu). Aspek Rakjat telah merupakan aspek pokok, dan memegang peranan memimpin dalam kekuasaan negara RI.”<sup>18</sup>

“Teori dua aspek” djelas merupakan penjelewengan oportuniste atau revisionisme, karena mengingkari ajaran Marxisme-Leninisme bahwa” negara adalah suatu alat kekuasaan klas tertentu jang tidak dapat didamaikan dengan antipodenja. (klas jang berlawanan dengannja).”<sup>19</sup> Tidak mungkin RI dikuasai bersama oleh Rakjat dan musuh<sup>2</sup> Rakjat.

Dalam masyarakat Indonesia memang terdapat kekuatan<sup>2</sup> jang berdjung melawan sistim ekonomi kolonial dan setengah-feodal jaitu klas buruh, kaum tani, burdjuis ketjil dan dalam batas<sup>2</sup> tertentu djuga burdjuasi nasional. Akan tetapi menganggap bahwa kekuatan<sup>2</sup> itu mempunjai konsepsi jang sama untuk “ekonomi nasional dan demokratis” adalah salah. Ada dua konsepsi jang berlainan satu sama lain, jaitu konsepsi burjuasi nasional dan konsepsi proletariat. Diselubungi dengan nama apa sadja, seperti “ekonomi nasional dan demokratis”, “ekonomi terpimpin”, dsb, konsepsi burdjuasi nasional tidak lain menghendaki perkembangan kapitalisme dalam negeri setjara penuh.

Konsepsi proletariat adalah untuk ekonomi Demokrasi Rakjat jang berarti: nadionalisasi semua kapital dan perusahaan imperialis, komprador dan kaum reaksioner lainnja serta pembagian tanah milik tuan-tanah kepada kaum tani setjara tjuma<sup>2</sup>. Ini adalah ekonomi peralihan ke sosialisme jang hanja mungkin diselenggarakan sesudah berdirinja diktatur Demokrasi Rakjat, jaitu kekuasaan bersama klas<sup>2</sup> anti-imperialis dan anti-feodal dibawah pimpinan proletariat. Dalam ekonomi Demokrasi Rakjat sektor sosialis jaitu perusahaan<sup>2</sup> vital jang dimiliki oleh negara Rakjat memegang pimpinan dalam seluruh kehidupan ekonomi negeri.

<sup>18</sup> D.N. Aidit, *Kibarkan Tinggir<sup>2</sup> Pandji Revolusi*.

<sup>19</sup> Lenin. *Negara dan Revolusi*.

Sebelum terbentuk kekuasaan Demokrasi Rakjat, perjuangannya di bidang ekonomi tidak mungkin melahirkan susunan ekonomi Demokrasi Rakjat. Pengambilalihan perusahaan<sup>2</sup> imperialis dan adanya perusahaan<sup>2</sup> negara dibawah kekuasaan RI tipe lama, tidak melahirkan sektor sosialis dalam ekonomi, karena perusahaan negara tersebut tidak menjadi milik Rakjat, yang diurus oleh negara Rakjat, tetapi jatuh ke tangan kaum kabir. Demikian juga UUPA samasekali tidak membebaskan kaum tani dari penindasan dan penghisapan sisa<sup>2</sup> feodalisme.

Meniadakan perbedaan konsepsi burdjuasi nasional dan konsepsi proletariat, dan menjatukannya dalam perumusan “ekonomi nasional dan demokratis” tanpa mempersoalkan keharusan terbentuknya kekuasaan Demokrasi Rakjat lebih dulu, berarti ditinggalkannya pendirian kelas proletar dan penjerahan kepada burdjuasi. Djelaslah bahwa lahirnya konsepsi ekonomi seperti “Deklarasi Ekonomi” (Dekon) tidak berarti bahwa kekuatan kelas buruh dan Rakjat pekerdja lainnya yang berdjung melawan ekonomi kolonial dan setengah-feodal sudah ditjerminkan dalam kekuasaan negara. Unsur Demokrasi Rakjat tidak mungkin tumbuh dalam kekuasaan negara yang mewakili kepentingan imperialisme dan sisa<sup>2</sup> feodalisme.

Dalam kekuasaan negara RI memang terdapat kontradiksi, yaitu kontradiksi antara kaum komprador dan elemen<sup>2</sup> tuan-tanah yang mewakili kepentingan imperialisme dan sisa<sup>2</sup> feodalisme disatu pihak, dengan burdjuasi nasional yang dalam batas<sup>2</sup> tertentu anti-imperialisme dan anti-feodalisme di pihak lain. Tetapi kedudukan burdjuasi nasional dalam kekuasaan negara tidak dapat dikatakan mewakili kepentingan Rakjat dan oleh karena itu tidak dapat dinamakan segi Rakjat dalam kekuasaan negara. Kontradiksi demikian itu tidak akan menghasilkan perubahan watak kelas negara setjara fundamental.

Duduknya pemimpin<sup>2</sup> Partai dalam pemerintahan baik di pusat maupun di daerah juga tidak dapat diartikan berubahnya kwalitet segi yang diduduki burdjuasi nasional menjadi segi Rakjat. Karena gabungan kekuatan burdjuasi nasional dan proletariat bukannya dipimpin oleh proletariat, tetapi dipimpin oleh burdjuasi nasional. Kedudukan pemimpin<sup>2</sup> Partai dalam pemerintah yang tidak memegang kekuatan riil itu, adalah sebagai konsesi politik dari

burdjuasi nasional jang memerlukan sokongan dari Rakjat dalam kontradiksi menghadapi burdjuasi komprador dan dalam batas<sup>2</sup> tertentu djuga dengan kaum imperialis.

Burdjuasi nasional dengan sokongan massa Rakjat jang dipimpin oleh PKI dalam batas<sup>2</sup> tertentu dapat mendesak burdjuasi komprador dalam kekuasaan negara. Keadaan itu ditunjukkan oleh adanya tindakan<sup>2</sup> politik pemerintah RI seperti penbatalan KMB, pembebasan Irian Barat, diterimanja Undang<sup>2</sup> Perdjandjian Bagi Hasil, Undang<sup>2</sup> Pokok Agraria, politik penghantjuran kekuatan bersendjata kontra-revolusioner DI/TII, PRRI/Permesta, diterimanja Manipol dan Dekon, politik luar negeri anti-imperialis, dll.

Pimpinan Partai jang sudah terdjerumus ke dalam lumpur oportuniste menilai peristiwa<sup>2</sup> itu terlalu tinggi, jaitu bahwa”aspek Rakjat” telah merupakan aspek pokok, dan memegang peranan memimpin dalam kekuasaan negara RI. Se-olah<sup>2</sup> Rakjat Indone-sia sudah dekat dengan akan lahirnja kekuasaan Rakjat. Dan karena menganggap bahwa kekuatan burdjuasi nasional dalam kekuasaan negara adalah benar<sup>2</sup> sebagai “aspek Rakjat,” maka pimpinan Partai telah berbuat se-gala<sup>2</sup>nja untuk membela dan mengembangkan “aspek Rakjat” itu. Pimpinan Partai sudah benar<sup>2</sup> meleburkan diri dalam kepentingan burdjuasi nasional.

Djelaslah bahwa pimpinan Partai telah menggunakan teori tentang kontradiksi dalam kekuasaan negara setjara subjektif. Ketjuali itu dengan menganggap kedudukan burdjuasi nasional sebagai segi Rakjat dalam kekuasaan negara RI dan Presiden Sukarno sebagai pemimpinnja, berarti menganggap bahwa bardjuasi nasional mampu memimpin revolusi burdjuis demokratis tipe baru. Ini bertentangan dengan keharusan dan kenjataan sedjarah.

Pimpinan PKI mengatakan bahwa “teori dua aspek” samasekali tidak sama dengan “teori perubahan.struktur.”<sup>20</sup> dari pemimpin<sup>2</sup> Partai Komunis Italia jang revisionis itu. Tetapi baik setjara teori maupun berdasar kenjataan praktek tidak ada perbedaan antara

<sup>20</sup> Pemimpin Partai Komunis Italia menganggap bahwa diktatur proletariat di Italia dapat dibentuk bukan melalui revolusi proletar dengan menghantjurkan mesin negara burdjuis, tetapi melalui perubahan ber-angsur<sup>2</sup> dalam struktur negara, dengan menggunakan UUD Italia dan dengan tjara parlementer.

kedua “teori” itu. Ke-dua<sup>2</sup>nja bertolak dari djalan damai mentjapai sosialisme, ke-dua<sup>2</sup>nja mengchajalkan perubahan setjara berangsur<sup>2</sup> perimbangan intern dan susunan negara; ke-dua<sup>2</sup>nja sama<sup>2</sup> menolak djalan revolusi dan ke-dua<sup>2</sup>nja sama<sup>2</sup> revisionis.

“Teori dua.aspek” jang anti-revolusi itu djelas dinjatakan dalam keterangan bahwa “Perjuangan PKI mengenai kekuasaan negara jalah mendorong supaja aspek pro-Rakjat makin besar dan bisa berdominasi, sedangkan kekuatan<sup>2</sup> jang anti Rakjat dikeluarkan dari kekuasaan negara”<sup>21</sup>

Oleh pimpinan Partai djalan jang anti-revolusi itu bahkan dinamakan djalan “revolusi dari atas dan dari bawah.” Dari atas berarti bahwa PKI harus mendorong kekuasaan negara untuk melakukan tindakan<sup>2</sup> revolusioner guna mengadakan perubahan<sup>2</sup> dalam personalia dan aparaturnegara. Sedang dari bawah berarti membangkitkan, mengorganisasi dan memobilisasi Rakjat untuk mentjapai perubahan<sup>2</sup> tersebut.<sup>22</sup> Sungguh suatu fantasi jang luar biasa! Pimpinan Partai tidak beladjar dari kenjataan bahwa Konsepsi Presiden Sukarno tentang pembentukan Kabinet Gotong-Rojong (Pemerintah Koalisi Nasional tipe baru) sudah delapan tahun sedjak diumumkan, belum pernah dan tidak ada tanda<sup>2</sup> akan dilaksanakan, walaupun terus dituntut. Apalagi perubahan kekuasaan negara!

Lenin memang pernah menundjukkan terbukanja kemungkinan “aksi dari atas”, jaitu ketika terdapat kemungkinan mengambil bagian dalam pemerintah revolusioner sementara mendjelang revolusi Rusia tahun 1905. Ketika itu adalah periode dari pergolakan<sup>2</sup> politik dan revolusi<sup>2</sup> telah mulai.<sup>23</sup> Apabila tidak mungkin bertindak dari atas menurut Lenin harus dilakukan tekanan dari bawah, dan untuk itu proletariat harus dipersendjatai.

Djelaslah betapa bedanja situasi dan sjarat<sup>2</sup> jang diadjukan Lenin tentang terbukanja kemungkinan “Aksi dari atas” dan sjarat<sup>2</sup> “aksi dari bawah” dengan situasi dan sjarat<sup>2</sup> di Indonesia tentang “revolusi dari atas dan dari bawah”. Jang satu diadjukan bukan hanja dalam

<sup>21</sup> D.N. Aidit, *Kibarkan tinggi<sup>2</sup> Pandji Revolusi*.

<sup>22</sup> D.N. Aidit, *Kibarkan tinggi<sup>2</sup> Pandji Revolusi*.

<sup>23</sup> Lenin, *Dua Taktik Sosial Demokrasi Dalam Revolusi Demokrasi*.

situasi relatif damai, tetapi juga setjara oportunistis.

“Teori dua aspek” adalah sama dengan pemutarbalikkan Kautsky terhadap Marxisme tentang negara. Kautsky setjara teori tidak menjangkal bahwa negara adalah alat kekuasaan klas. Jang dikaburkan atau dihilangkan oleh Kautsky ialah “bahwa pembebasan klas tertindas tidaklah mungkin bukan hanja tanpa revolusi jang keras, tetapi juga tanpa penghantjuran aparat kekuasaan negara jang ditjiptakan oleh klas jang berkuasa . . .”<sup>24</sup>

Untuk membersihkan diri dari lumpur oportuniste, Partai kita harus membuang “teori dua aspek dalam kekuasaan negara” dan menegakkan kembali adjaran<sup>2</sup> Marxisme-Leninisme tentang negara dan revolusi.

o o o o o o o

Salah satu kesalahan penting jang dikoreksi dalam *Djalan Baru* adalah kelalaian PKI menggalang front persatuan nasional selama berlamsungnja Revolusi Agustus 1945. Kaum Komunis telah lalai mengadakan front persatuan nasional sebagai sendjata revolusi nasional terhadap imperialisme.<sup>25</sup>

Dalam periode sesudah tahun 1951, masalah menggalang front persatuan nasional ditetapkan sebagai salahsatu tugas Partai. Bahkan Kongres Nasional Ke-V PKI menetapkan bahwa menggalang front persatuan nasional merupakan tugas urgen kedua. Garis ini tetap diteruskan dalam Kongres Nasional Ke-VI Partai dan seterusnya. Front nasional ditempatkan sebagai soal pertama dalam “Garis Umum” Partai atau pandji pertama dari Tripandji Partai. Ini menundjukkan bagaimana pimpinan Partai menilai front persatuan nasional. Dari “melalaikan” pada tahun 45-an, berubah mendjadi menomer-satukan front persatuan nasional.

Kongres Nasional Ke-V Partai pada pokoknja telah memetjahkan setjara teori tentang front persatuan nasional. Telah dirumuskan bahwa persekutuan buruh dan tani adalah basis dari front persatuan

<sup>24</sup> Lenin, *Negara dan Revolusi*.

<sup>25</sup> Lihat *Djalan baru Untuk Republik Indonesia* (Resolusi Politbiro CC PKI, Agustus 1948).

nasional. Mengenai burdjuis nasional, berdasar pengalaman Revolusi Agustus telah ditarik peladjaran bahwa klas ini bersikap bimbang. Dalam keadaan tertentu burdjuasi nasional ikut dan berfihak kepada revolusi, dan dalam keadaan lain ikut burdjuasi komprador memukul tenaga penggerak revolusi dan mengchianati revolusi (provokasi Madiun dan menjetudjuai persetudjuan KMB). Berdasarkan sikap bimbang burdjuasi nasional ini telah dirumuskan sikap jang harus didjalankan oleh PKI, jaitu harus senantiasa berusaha menarik burdjuasi nasional ke fihak revolusi, tetapi harus djuga ber-djaga<sup>2</sup> kemungkinan burdjuasi nasional mengchianati revolusi. PKI harus mendjalankan politik bersatu dan berdjuaug terhadap budjuasi nasional.

Meskipun demikian, oleh karena kelemahan ideologi subjektivisme belum terkikis dari dalam Partai, chususnya dalam pimpinan Partai, maka Partai kita telah terseret dalam kesalahan jang makin lama makin dalam, sehingga achirnja Partai kehilangan kebebasan dalam front persatuan dengan burdjuasi nasional. Kesalahan ini telah mengakibatkan Partai dan proletariat ditempatkan sebagai embel<sup>2</sup> burdjuasi nasional.

Proses berkembangnja kesalahan<sup>2</sup> dalam melaksanakan front persatuan nasional dapat dikemukakan setjara ringkas sebagai berikut:

Bersamaan dengan dilakukannja pembangunan kembali Partai pada tahun 1951, dilakukanlah usaha<sup>2</sup> untuk menarik kembali burdjuasi nasional ke fihak Rakjat. Dengan menggunakan kontradiksi antara burdjuasi nasional dengan burdjuasi komprador, Partai berhasil menarik burdjuasi nasional ber-angsur<sup>2</sup> ke fihak Rakjat. Ini dimulai pada waktu perdjuaugan melawan razzia Agustus Sukiman dan perdjuaugan untuk mendjatuhkan pemerintah Sukiman jang berhasil dengan terbentuknja kabinet Wilopo. Ketika itu dan untuk tahun<sup>2</sup> berikutnya Partai masih lemah dan persekutuan buruh dan tani belum tergalang. Djadi front persatuan dengan burdjuasi nasional tergalang dan berkembang tidak diatas dasar jang kuat, jaitu persekutuan buruh dan tani dibawah pimpinan klas buruh.

Pimpinan Partai menilai terbentuknja front persatuan.dengan burdjuasi nasional membukakan kemungkinan bagi perkembangan dan pembangunan Partai dan bagi pekerdjaan Partai jang terdekat,



jaitu menggalang persekutuan buruh dan kaum tani anti-feodalisme.<sup>26</sup> Dari penilaian inilah lahirnya kesimpulan bahwa menggalang front persatuan nasional adalah tugas urgen pertama PKI. Dalam kesimpulan ini tersirat pengertian bahwa yang diartikan front persatuan nasional itu adalah terutama front persatuan dengan burdjuari nasional.

Dalam keadaan belum tergalangnja persekutuan buruh dan tani setjara kuat, front persatuan dengan burdjuasi nasional dapat berlangsung terus oleh karena dua sebab, pertama, dalam kontradiksinja menghadapi burdjuasi komprador, burdjuasi nasional memerlukan sokongan dari klas buruh; kedua, karena Partai memberikan sokongan yang diperlukan itu tanpa menimbulkan kechawatiran akan mengantjam kedudukan burdjuasi nasional.

Tergalangnja front persatuan dengan burdjuasi nasional melahirkan pemerintahan yang dalam batas<sup>2</sup> tertentu mendjalankan politik anti-imperialis dan memberikan sedikit kelonggaran kepada PKI dan organisasi<sup>2</sup> massa revolusioner. Keadaan itu memang agak unik untuk mengembangkan Partai, chususnja di desa<sup>2</sup> untuk menggalang persekutuan buruh dan tani. Sjarat untuk menggalang persekutuaa buruh dan tani setjara politikpun sudah ada, jaitu adanya program agraria revolusioner.

Tetapi dalam bekerdjasama dengan burdjuasi nasional ini kelemahan<sup>2</sup> ideologi dalam Partai, chususnja dalam kalangan pimpinan Partai telah berkembang, mendapat pengaruh dari ideologi burdjuis-melalui kerdjasama. itu. Berkembangnja kelemahan ideologi dalam Partai menjebabkan makin lama Partai makin kehilangan kebebasan dalam front persatuan dengan burdjuasi nasional. Partai terlalu banjak memberi konsesi<sup>2</sup> kepada burdjuasi nasional sampai menghilangkan peranan memimpinnja setjara bebas.

Salah satu wujud hilangnya kebebasan Partai dalam front persatuan dengan burdjuasi nasional adalah penilaian dan sikap pimpinan Partai terhadap Bung Karno. Pimpinan Partai tidak bersikap bebas terhadap Bung Karno, selalu menghindari

<sup>26</sup> D.N. Aidit, *Peladjaran Dari Sedjarah PKI* (Pidato ulangtahun ke-40 PKI).

pertentangan dan sebaliknya selalu menondjolkan persamaan atau persatuan Partai dengan Bung Karno. Umum melihat tidak ada politik Bung Karno yang tidak disokong oleh PKI. Samaipun tanpa melalui perjuangannya pimpinan Partai menerima pengakuan Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi dan pemimpin “aspek Rakjat” dalam kekuasaan negara RI. Dalam tulisan<sup>2</sup> dan dalam pidato<sup>2</sup> pemimpin<sup>2</sup> Partai banjak dikemukakan bahwa apa yang dilakukan oleh PKI ketjuali berdasar ajaran Marxisme-Leninisme juga berdasar “ajaran Bung Karno”, bahwa PKI mengalami perkembangan pesat karena melaksanakan ide Bung Karno tentang persatuan Nasakom, dan bah kan konsepsi sistim Demokrasi Rakjat Indonesia itupun sesuai dengan pokok<sup>2</sup> fikiran Bung Karno yang dikemukakan dalam pidato Lahirnya Pantjasila (1 Djuni 1945).<sup>27</sup> Dengan demikian pimpinan Partai tidak mendidikkan kepada kelas buruh dan Rakjat pekerdja lainnja tentang keharusan pimpinan revolusi berada di tangan proletariat dan partainja, jaitu PKI.

Pimpinan Partai mombanggakan bahwa lahirnja Manipol berarti perjuangannya Rakjat Indonesia yang gigih dibawah pimpinan PKI telah berhasil membawa massa yang luas untuk mengakui kebenaran Program PKI.<sup>28</sup>

Tertjapainja suatu program bersama untuk front persatuan adalah baik; dalam arti ini lahirnja Manipolpun mempunjai arti yang baik, sebab sampai batas<sup>2</sup> tertentu mempersatukan fikiran berbagai kelas dan golongan anti-imperialis mengenai bagian tertentu dari soal<sup>2</sup> revolusi Indonesia. Tetapi tidaklah benar bahwa lahirnja Manipol dengan penegasan<sup>2</sup>nja berarti pengakuan massa luas terhadap kebenaran program PKI. Sebab hanya bagian<sup>2</sup> tertentu sadja dari Program Partai yang sama dengan Manipol.

Kaum Komunis tidak boleh naif, menganggap kelas<sup>2</sup> lain yang bukan termasuk tenaga<sup>2</sup> penggerak revolusi dengan mudah menerima Program PKI. Mereka menerima bagian<sup>2</sup> yang termasuk dalam program tuntutan Partai, yang sekiranya memang sesuai dengan kepentingan mereka. Sedang yang tidak sesuai, misalnja mengenai

<sup>27</sup> Laporan Politik D.N. Aidit pada Sidang Pleno Ke-4 CC Kongres Nasional Ke-V PKI.

<sup>28</sup> D.N. Aidit, *Kibarkan tinggi<sup>2</sup> Pandji Revolusi*.

peranan memimpin klas buruh, mengenai program agraria revolusioner dll tidak mereka terima. Terhadap bagian<sup>2</sup> yang sudah mereka terima itupun tidak ada djaminan akan dilaksanakan. Dalam pada itu kaum reaksioner yang masih berdominasi dalam kekuasaan negara menerima setjara munafik Manipol untuk menyesuaikan diri dengan arus keadaan. Oleh karena itu betapapun dilaksanakan setjara konsekwen Manipol tidak akan sama dengan Program PKI. Djadi menjatakan bahwa melaksanakan [...] sama dengan [...] Program PKI yang diterima oleh burdjuasi, melainkan program burdjuasi nasional yang diterima oleh PKI dan menggantikan Program PKI.

Pengorbanan prinsip dalam front persatuan dengan burdjuasi nasional berkembang lebih djauh lagi dengan ditjantumkannya apa yang dinamakan “Garis umum Revolusi Indonesia” yang dirumuskan “Dengan front persatuan nasional yang bersokoguru buruh dan tani, berporoskan Nasakom, berlandaskan idiil Pantjasila, menjelesaikan revolusi nasional-demokratis menudju Sosialisme Indonesia”<sup>29</sup> Apa yang dinamakan “Garis Umum Revolusi Indonesia” ini samasekali tidak berbau revolusi. Karena dari tiga sjarat untuk memenangkan revolusi jaitu partai Marxis-Leninis yang kuat, perdjjuangan Rakjat bersendjata dibawah pimpinan Partai dan front persatuan nasional, hanja tinggal front persatuan nasional sadja. Inipun bukan lagi front persatuan nasional revolusioner, karena tidak dipimpin oleh klas buruh, tidak berlandaskan persatuan klas buruh dan kaum tani dibawah pimpinan klas buruh, tetapi berlandaskan Nasakom. Dikatakan bahwa tanpa poros Nasakom front persatuan nasional sama dengan roda tanpa as, yang pasti tidak bisa berputar.<sup>30</sup>

Pimpinan Partai mengatakan bahwa sembojan “kegotong-rojongan nasional berporoskan Nasakom tidak mungkin mengaburkan isi klas dari front persatuan nasional.”<sup>31</sup> Pernyataan ini tidak benar, karena partai<sup>2</sup> politik di luar partai klas buruh terutama mewakili burdjuasi nasional, komprador, kabir dan tuan-tanah. Karena partai<sup>2</sup> komprador jaitu Masjumi dan PSI telah dilarang, maka

<sup>29</sup> D.N. Aidit, *Laporan kepada Sidang Pleno Ke-4 CC PKI*, Mei 1965.

<sup>30</sup> D.N. Aidit, *Laporan umum Kepada Kongres ke-VII PKI* (1962).

<sup>31</sup> D.N. Aidit, *Kibarkan tinggi<sup>2</sup> Pandji Revolusi*.

kaum komprador dan tuan-tanah mentjari saluran ke dalam partai<sup>2</sup> atau organisasi lainnja, baik jang beraliran nasionalis maupun agama. Djadi isi klas Nasakom adalah klas buruh, burdjuasi nasional dan bahkan terdapat elemen<sup>2</sup> komprador, kabir dan tuan-tanah. Teranglah bahwa mendjadikan Nasakom sebagai poros bukan sadja mengaburkan isi klas dari front persatuan nasional, tetapi mengubah sama sekali arti front persatuan nasional revolusioner mendjadi persekutuan klas buruh dengan semua klas, termasuk klas<sup>2</sup> reaksioner atau kolaborasi klas.

Kesalahan tersebut harus dibetulkan. Partai harus membuang “Garis Umum Revolusi Indonesia” jang salah itu dan harus kembali pada konsepsi jang benar jaitu front persatuan nasional revolusioner berbasiskan persekutuan buruh dan tani dibawah pimpinan klas burun.

Pengorbanan prinsip dalam front persatuan dengan burdjuasi nasional djuga disebabkan karena Partai tidak melakukan setjara tepat analisa kongkrit atas sutuasi kongkrit. Dalam tulisan *Masyarakat Indonesia Dan Revolusi Indonesia* (MIRI jang disahkan oleh Sidang Pleno Ke-V CC PKI, bulan Juli 1957 sebagai diktat peladjaran bagi sekolah<sup>2</sup> partai) dikatakan bahwa menggulingkan imperialisme adalah tugas primer dari dua tugas urgen menggulingkan imperialisme dan sisa<sup>2</sup> feodalisme. Garis demikian ini djuga terdapat dalam dokumen<sup>2</sup> Partai lainnja dengan berbagai variasi, seperti “udjung tombak-dewasa ini ditudjukan terhadap musuh terpokok jaitu imperialisme,”<sup>32</sup> bahwa “kontradiksi pokok di Indonesia dewasa ini jalah kontradiksi antara Rakjat Indonesia disatu fihak dengan kaum imperialis difihak lain”<sup>33</sup> Dari pandangan jang salah mengenai keadaan kongkrit jang demikian itulah lahirnja sembojan “menempatkan kepentingan klas dibawah kepentingan nasionall”<sup>34</sup> jang diambil setjara dogmatis dari sembojan kaum Komunis Tiongkok jang tepat pada waktu memobilisasi perlawanan terhadap agresinya Djepang.

Kesalahan itu tidak memungkinkan Partai menggalang persekutuan buruh dan tani jang kuat dan terkonsolidasi, meskipun

<sup>32</sup> D.N. Aidit, *Pidato pada Konferensi Teori Ke-1 PKI*.

<sup>33</sup> D.N. Aidit, *Kibarkan tinggi<sup>2</sup> Pandji Revolusi*.

<sup>34</sup> D.N. Aidit, *Laporan pada Sidang pleno Ke-2 CC kongres Ke-VI PKI*.

pengaruh Partai meluas ke desa<sup>2</sup>. Sebab dibawah sembojan jang salah “menggulingkan imperialisme adalah tugas primer”, maka semua kontradiksi diantara klas<sup>2</sup> di dalam negeri, termasuk kontradiksi antara tuan-tanah dengan kaum tani diharuskan tunduk pada “kontradiksi pokok dengan kaum imperialis.”

Sesudah Revolusi Agustus 1945 jang gagal itu, ketjuali di Irian Barat, kaum imperialis tidak memegang kekuasaan politik setjara langsung di Indonesia. Kekuasaan politik di Indonesia berada di tangan kaum komprador dan tuan-tanah jang mewakili kepentingan imperialisme dan sisa<sup>2</sup> feodalisme. Di Indonesia djuga tidak sedang terdjadi agresi imperialis. Dalam keadaan demikian, djika tidak ada kesalahan<sup>2</sup> politik PKI, maka kontradiksi antara klas<sup>2</sup> reaksioner jang berkuasa dengan Rakjat akan berkembang mendjadi tadjam dan merupakan kontradiksi pokok di Indonesia. Tugas primer revolusi Indonesia adalah menggulingkan kekuasaan klas<sup>2</sup> reaksioner dalam negeri jang djuga mewakili kepentingan kaum imperialis, chususnja imperialis AS. Dan hanja dengan djalan itulah dapat dilakukan penggulingan setjara njata imperialisme dan sisa<sup>2</sup> feodalisme.

Mengkoreksi kesalahan<sup>2</sup> Partai dalam front persatuan dengan burdjuais nasional tidak berarti bahwa sekarang Partai tidak perlu menggalang persatuan dengan klas ini. Selama susunan ekonomi Indonesia masih kolonial dan setengah-feodal, selama itu tetap ada lapisan dari klas burdjuis jang mengalami tindasan dari imperialisme dan mengalami hambatan<sup>2</sup> dari sisa<sup>2</sup> feodalisme. Lapisan dari klas burdjuis itu jalah burdjuais nasional jang dalam batas<sup>2</sup> tertentu anti-imperialisme dan sisa<sup>2</sup> feodalisme. Atas dasar persekutuan buruh dan tani dibawah pimpinan klas buruh, Partai harus berusaha untuk menarik klas burdjuis nasional untuk memihak revolusi.

o o o o o o o

Demikianlah pokok<sup>2</sup> kesalahan oportuniste kanan PKI di bidang politik jang berkumbang ke revisionisme dan mentjapai puntjaknya mendjelang terdjadinja “Peristiwa 30 September.” Pada waktu penjelewangan ke kanan telah menjeluruh dan sempurna, muntjullah ketjenderungan lain jang berlawanan jaitu ketjenderungan “kiri”. Ketjenderungan “kiri” ini berupa penilaian

jang ber-lebih<sup>2</sup>an terhadap kekuatan Partai, klas buruh dan Rakjat pekerdja, mem-besar<sup>2</sup>kan hasil perdjungan Rakjat serta meremehkan kekuatan<sup>2</sup> kaum reaksioner.

Situasi politik dalam negeri ketika itu memang mulai menundjukkan adanja ketegangan<sup>2</sup>. Aksi<sup>2</sup> Rakjat mandapatkan kemenangan<sup>2</sup> politik, misalnja: pemboikotan film AS; pengusiran “Peace Corps” AS; tindakan terhadap Ampai dan Bill Parmer, larangan terhadap Manikebu; pengambilalihan perusahaan<sup>2</sup> Inggris; pembubaran BPS dan Partai Murba; aksi menentang agresi AS terhadap Vietnam makin mendapat dukungan luas. Di berbagai daerah mulai terdjadi aksi<sup>2</sup> sefihak kaum tani untuk memenangkan tuntutan turun sewa. Sebagai reaksi terhadap kemenangan<sup>2</sup> perdjungan Rakjat itu, kaum reaksioner dalam negeri dengan berkomplot dengan kaum imperialis AS djuga meningkatkan aktivitetnja, menimbulkan provokasi<sup>2</sup> terhadap kaum buruh dan tani, menjebarkan dokumen palsu, dsb.

Tesis 45 tahun PKI disatu pihak menegaskan bahwa “Kaum kapitalis birokrat bukan sadja makin memperburuk keadaan ekonomi Indonesia dewasa ini, tapi djuga berusaha merebut kekuasaan politik dengan djalan kudeta.” Difihak lain menegaskan bahwa “Perlawanan jang makin meningkat dari Rakjat Indonesia terhadap imperialisme, feodalisme dan kekuatan kontra-revolusioner di dalam negeri menundjukkan buhwa dewasa ini telah terdapat situasi revolusioner jang makin menandjak dan mematang di negeri kita.”

Menurut Lenin situasi revolusioner atau periode revolusioner adalah saat<sup>2</sup> apabila “‘bangunan atas’ jang lama telah meretak dari atas sampai kebawah, apabila aksi politik jang terbuka di fihak klas<sup>2</sup> dan massa jang mentjiptakan bangunan atas baru untuk diri mereka sendiri telah mendjadi suatu kenjataan.”<sup>35</sup> Dibanding dengan apa jang dikatakan Lenin itu, situasi politik di Indonesia ketika itu, dengan terdjadinja aksi<sup>2</sup> ambalalih perusahaan<sup>2</sup> Inggris, demonstrasi<sup>2</sup> anti-imperialis dan anti-kabir jang terdjadi ber-turut<sup>2</sup> di ibukota dan kota<sup>2</sup> besar lainnja belum dapat dikatakan sudah mentjapai taraf situasi revolusioner, apalagi “situasi revolusioner jang makin menandjak dan mematang.” Tuntutan<sup>2</sup> berbagai aksi

<sup>35</sup> Lenin, *Dua Taktik Sosial Demokrasi Dalam Revolusi Demokrasi*.

jang puntjaknja adalah demonstrasi<sup>2</sup> itu pada hakekatnja masih dalam rangka tuntutan bagian atau reform. Sedangkan di kalangan kaum tani sebagai kekuatan utama revolusi Indonesia tingkat aksinja masih belum tinggi dan belum luas. Apa jang dianggap tiap hari ada ribuan aksi<sup>2</sup> di desa<sup>2</sup>, adalah tidak njata, sebab aksi<sup>2</sup> petisi tertulis, perbaikan saluran air dll dihitung dalam mendjumlah aksi. Aksi<sup>2</sup> jang langsung melawan tuan-tanah pribumi belum banjak dan belum merata.

Kesimpulan tentang “situasi revolusioner jang makin matang” tidak lain adalah karena metode berfikir jang mandjadikan kemauan subjektif, perasaan subjektif dan angan<sup>2</sup> subjektif sebagai kenjataan. Pimpinan Partai takut melihat kenjataan jang berlainan dengan kemauan subjektifnja. Pimpinan Partai tidak senang kalau Comite<sup>2</sup> daerah dan badan<sup>2</sup> Partai lainnja melaporkan kenjataan bahwa tingkat perkembangan aksi<sup>2</sup> massa belum seperti jang sudah disimpulkan. Akibatnja untuk menjenangkan kemauan subjektif pimpinan dikemukakan taksiran jang ber-lebih<sup>2</sup>an mengenai aksi<sup>2</sup> massa, chususnya aksi tani.

Pimpinan Partai berusaha meningkatkan “situasi revolusioner jang makin matang itu” mendjadi “revolusi.” Ini dikemukakan dalam Statement Politbiro CC PKI, 17 Agustus 1965.

Dalam statement itu diserukan bahwa kaum Komunis harus bekerdja lebih keras “guna mengembangkan situasi revolusioner sekarang ini sampai kepada puntjaknja,” supaja Rakjat “dapat mentjapai bukan sadja kemenangan<sup>2</sup> jang lebih besar lagi, tetapi djuga kemenangan<sup>2</sup> jang fundamental.” Inilah puntjak kesalahan jang lain, jang “kiri,” jang telah menjeret pimpinan Partai ke dalam avonturisme dan telah menimbulkan bentjana besar bagi Partai dan gerakan revolusioner pada umumnja.

## KESALAHAN<sup>2</sup> POKOK DI BIDANG ORGANISASI

Garis politik jang salah jang berkuasa dalam Partai, tidak boleh tidak tentu diikuti oleh garis organisasi jang salah pula. Makin lama dan makin dalam berkuasannya garis politik jang salah dalam Partai, makin besar pula kesalahan<sup>2</sup> di bidang organisasi, makin besar kerugian<sup>2</sup> jang ditimbulkannja. Oportunisme kanan jang merupakan garis politik salah Partai dalam periode sesudah tahun

1951, diikuti oleh penjelewan ke kanan pula di lapangan organisasi, jaitu liberalisme dan legalisme.

Garis liberalisme di bidang organisasi menampakkan diri pada ketjenderungan untuk mendjadikan PKI suatu partai jang beranggota se-banjak<sup>2</sup>nja, suatu organisasi jang longgar, jang dinamakan partai Masalah apakah Partai Komunis perlu mempunjai keanggotaan se-banjak<sup>2</sup>nja (partai massa), atau keanggotaan tidak perlu banjak<sup>2</sup> asal kwalitetnja tinggi (partai leader), merupakan persoalan bagi Partai<sup>2</sup> Komunis di berbagai negeri. Mula<sup>2</sup> dengan melalui plan peluasan anggota dan organisasi PKI menempuh garis untuk mendjadi partai massa. Tetapi pada tahun<sup>2</sup> belakangan ini djatakan bahwa PKI adalah partai massa dan partai kader sekaligus. Dengan partai massa dimaksudkan keanggotaan jang banjak dan pengaruh jang luas serta dalam di kalangan massa. Dengan partai kader dimaksud keanggotaan partai jang dipersendjatai dengan Marxisme-Leninisme jang merupakan elemen<sup>2</sup> aktif dan memimpin di kalangan massa.

Bagaimana seharusnya Partai Marxis-Leninis diorganisasi, bagaimana seharusnya sifat<sup>2</sup> partai Marxis-Leninis itu, sudah dibentangkan setjara djelas oleh Lenin dan Stalin. PKI telah mengambil intisari dari sifat<sup>2</sup> partai Marxis-Leninis dengan mentjantumkan dalam Konstitusinja bahwa “PKI adalah barisan depan dan bentuk organisasi klas jang tertinggi dari proletariat Indonesia.”

Sesungguhnya, bukanlah soal jang harus diperdebatkan apakah suatu Partai komunis (Marxis-Leninis) harus merupakan partai Massa atau partai kader. Kedua<sup>2</sup>nja tertjakup dalam sifat<sup>2</sup> partai jang intisarinja telah ditjantumkan dalam Konstitusi PKI itu. Kepeloporan Partai dalam klas buruh hanja bisa dipenuhi apabila disatu fihak Partai merupakan barisan jang paling depan dari seluruh barisan klas buruh dan difihak lain ia tak terpisah dari seluruh barisan klas buruh.

Stalin mendjelaskan arti kepeloporan Partai sebagai berikut: “Partai harus menjerap semua elemen terbaik dari klas buruh, pengalaman mereka, semangat revolusioner mereka, pengabdian mereka jang tak mementingkan diri untuk proletariat. Tetapi untuk betul<sup>2</sup> mendjadi pelopor, Partai harus dipersendjatai dengan teori



revolusioner, dengan pengetahuan hukum<sup>2</sup> gerakan, dengan pengetahuan hukum<sup>2</sup> revolusi. Tanpa ini ia tidak akan dapat mengarahkan (directing) perjuangan proletariat, memimpin proletariat .... Partai harus berdiri pada barisan terdepan kelas buruh; ia harus melihat lebih jauh dari kelas buruh; ia harus memimpin proletariat, dan tidak mengekor gerakan spontan”.<sup>36</sup>

Tulisan Stalin itu jelas menunjukkan syarat<sup>2</sup> yang harus dipenuhi oleh suatu partai Marxis-Leninis untuk memenuhi fungsinya sebagai partai pelopor kelas buruh. Syarat<sup>2</sup> itu juga jelas menunjukkan bahwa anggota partai bukanlah sembarang orang dari kalangan kelas buruh, tetapi adalah element terbaik dari kalangan kelas buruh, yang dipersendjatai dengan teori Marxisme-Leninisme. Tidak semua orang dari kalangan kelas buruh memenuhi syarat untuk menjadi anggota partai. Dalam arti ini partai Marxis-Leninis adalah partai leader.

Stalin juga menjelaskan bahwa “Partai tidak dapat hanya menjadi barisan pelopor. Bersamaan dengan itu ia harus menjadi barisan kelas, bagian dari kelas, berhubungan erat dengannya melalui semua nadi<sup>2</sup> dari hidupnya. Perbedaan antara pelopor dan bukan [...] kelas buruh, antara anggota<sup>2</sup> partai dan orang non-partai tak dapat lengkap sampai kelas<sup>2</sup> lenjap... Tetapi Partai akan berhenti menjadi partai bila perbedaan ini diperluas, menjadi tjelah, bila ia mengurung dirinya dalam rumah kerang dan menjadi dipisahkan dari massa non-Partai. Partai tidak dapat memimpin kelas bila ia tidak berhubungan dengan massa non-Partai, bila tak ada ikatan antara Partai dengan massa non-Partai, bila Massa itu tidak menerima kepemimpinannya”<sup>37</sup> (digaris bawahi menurut aslinja - Politbiro)

Keterangan Stalin tersebut menunjukkan keharusan partai-Marxis-Leninis memiliki karakter massa. Karena kepeloporan Partai hanya bisa diwujudkan apabila Partai dapat bersatu-padu dan mendapat sokongan dari Massa non-Partai. Dan sokongan massa hanya bisa diperoleh Partai, apabila ia dapat mengambil sikap yang tepat terhadap Rakyat dan dengan tjara<sup>2</sup> yang tepat memimpin Rakyat, apabila ia dapat membela kepentingan<sup>2</sup> Rakyat di segala

<sup>36</sup> J.W. Stalin, *Masalah<sup>2</sup> Leninisme*.

<sup>37</sup> J.W. Stalin, *Masalah<sup>2</sup> Leninisme*.

lapangan, pertama-tama di lapangan politik.

Djelaslah bahwa karakter massa Partai atau sifat Partai massa bukan pertama-tama ditandai oleh djumlah anggota jang banjak, melainkan ditandai pertama-tama oleh eratnja hubungan Partai dengan massa, oleh garis politik Partai jang membela kepentingan massa Rakjat, atau ditandai oleh dilaksanakannja garis massa Partai. Dan garis massa Partai ini hanja dapat dipertahankan apabila sjarat<sup>2</sup> kepeloporan Partai dipegang teguh, apabila anggota<sup>2</sup> Partai terdiri dari elemen<sup>2</sup> terbaik dari proletariat jang dipersendjatai dengan Marxisme-Leninisme. Oleh karena itu membangun partai Marxis-Leninis jang berkarakter massa tidak mungkin tanpa mengutamakan pendidikan Marxisme-Leninisme.

Dalam waktu beberapa tahun belakangan ini, PKI telah menempuh garis pembangunan partai jang menjalahi prinsip<sup>2</sup> Marxisme-Leninisme di lapangan organisasi. Setelah berhasil meluaskan anggota dan organisasi melalui plan<sup>2</sup> djangka pendek, Partai telah melaksanakan ber-turut<sup>2</sup> Plan 3 Tahun Pertama (Organisasi dan Pendidikan), Plan 3 Tahun Kedua (Pendidikan dan Organisasi) dan mulai Plan 4 Tahun (Tentang Kebudajaan, Ideologi dan Organisasi). Melalui plan<sup>2</sup> djangka pendek, Plan 3 tahun Pertama dan Kedua PKI telah meluas ke seluruh negeri, ke pulau<sup>2</sup> dan sukubangsa<sup>2</sup> di seluruh Indonesia, dengan keanggotaan lebih dari 3 djuta orang. Ini adalah suatu hasil jang besar.

Tetapi bersamaan dengan itu makin tumbuh liberalisme dalam Partai. Walaupun Plan 3 tahun Kedua dinjatakan mementingkan pendidikan ideologi, tetapi dalam praktek tetap di-tekan<sup>2</sup>kan pada peluasan anggota dan organisasi. Plan peluasan anggota telah dilaksanakan tanpa mengindahkan kemampuan organisasi untuk mengurus anggota<sup>2</sup> baru dan mendidiknja. Karena mengedjar djumlah jang ditetapkan dalam plan, Maka pelaksanaan peluasan anggota telah berdjalan dengan melanggar ketentuan<sup>2</sup> Konstitusi Partai. Begitu dibikin longgarnja organisasi PKI, sehingga setiap orang jang menjatakan setudju terhadap Program PKI diterima mendjadi anggota. Tidak djelas lagi bedanja anggota partai dengan anggota organisasi massa jang berada dibawah pimpinan Partai. Sjarat<sup>2</sup> keanggotaan barisan pelopor klas buruh ditinggalkan sama sekali.

Perluasan keanggotaan partai setjara liberal itu tidak bisa dipisahkan dengan garis politik menempuh djalan damai. Dengan keanggotaan partai jang besar dimaksudkan untuk memperbesar pengaruh Partai dalam front persatuan dengan burdjuis nasional. Dan dengan Partai jang makin besar, dengan terus bersatu dengan burdjuasi nasional, maka dapatlah ditjapai imbangan kekuatan jang memungkinkan mengalahkan kekuatan kepalabatu sama sekali. Kepentingan djalan damai mendjadi djelas ditjerminkan dalam organisasi dengan adanja P1 an 4 Tahun Partai.

Jang dipentingkan bukan lagi pendidikan dan latihan kader<sup>2</sup> Marxis-Leninis untuk persiapan revolusi, untuk bekerdja di-tengah<sup>2</sup> kaum tani menggalang basis<sup>2</sup> revolusi, tetapi pendidikan intelektual untuk melajani keperluan pekerdjaan front persatuan dengan burdjuasi nasional, dan untuk mengisi berbagai kedudukan di dalam lembaga<sup>2</sup> negara jang diperoleh berkat kerdjasama itu. Sembojan “mengintegrasikan diri setjara total dengan kaum tani” mendjadi omongkosong sadja. Jang dipraktekkan bukan mengirim kader<sup>2</sup> terbaik ke desa<sup>2</sup>, tetapi menarik kader<sup>2</sup> dari desa ke kota, dari daerah ke pusat.

Agar supaja martabat PKI tinggi di mata burdjuis dun dihormati sebagai partai orang<sup>2</sup> terpeladjar, maka menurut Plan 4 Tahun semua kader tinggi Partai diwadajibkan menamatkan pendidikan tingkat akademi, kader<sup>2</sup> menengah Partai tingkat sekolah landjutan atas, dan kader<sup>2</sup> bawahan tingkat landjutan pertama. Untuk keperluan ini banjak akademi, perguruan dan kursus<sup>2</sup> didirikan. Begitu dalamnja intelektualisme sudah menguasai pimpinan Partai, sehingga semua tokoh Partai dan tokoh gerakan rakjat, diharuskan membuat 4 buah karangan (skripsi) untuk mendapat gelar sardjana Marxis.

Makin dalam Partai terperosok ke dalam lumpur oportuniste kanan atau revisionisme, makin hilang pula kewaspadaan organisasi, berkembanglah legalisme dalam organisasi. Pimpinan Partai telah kehilangan prasangka klasnja terhadap kepalsuan demokrasi burdjuis. Seluruh kegiatan Partai menundjukkan seolah<sup>2</sup> begitu pastinja djalan damai itu. Pimpinan Partai tidak membangkitkan kewaspadaan massa anggota akan bahaya serangan kaum reaksioner jang terus menerus mentjari kesempatan. Karena

legalisme di lapangan organisasi inilah, maka dalam waktu singkat kontra-revolusi telah berhasil melumpuhkan PKI setjara organisasi.

Liberalisme dalam organisasi telah merusak prinsip demokrasi intern-Partai, merusak pimpinan kolektif dan menimbuhkan pimpinan dan kekuasaan perseorangan, otonomisme, jang memupuk tumbuhnja kultus individu. Jang dipraktekkan bukan lagi sentralisme-demokrasi, jaitu demokrasi jang dipusatkan, jang harus berdjalan atas dasar garis massa, memadukan pimpinan dengan massa, tetapi komandoisme atas dasar kemauan dun kepentingan subjektif pimpinan. Setjara formil, ketentuan<sup>2</sup> demokrasi intern-Partai, ketentuan<sup>2</sup> prinsip pimpinan kolektif bukannya ditiadakan sama sekali. Dan setjara formil keputusan<sup>2</sup> badan<sup>2</sup> pimpinan diambil dengan suara bulat. Akan tetapi bersamaan dengan itu tidak djarang pula diambil keputusan<sup>2</sup> tanpa melalui badan<sup>2</sup> pimpinan Partai jang seharusnya kompeten. Tjara jang salah, jang bertentangan dengan prinsip<sup>2</sup> Marxis-Leninis itu telah berdjalan antara lain disebabkan oleh faktor<sup>2</sup> sebagai berikut:

Pertama, kesalahan organisasi, chususnja, dalam tjara kerdja, jang memberikan kesempatan kepada pimpinan Partai untuk membangun saluran<sup>2</sup> tersendiri diluar kontrol Politbiro dan CC. Hal ini menjebakkan badan pimpinan Partai jang kompeten seperti Politbiro tidak ditempatkan pada tempat jang semestinja, tidak didjadikan tempat untuk memetjahkan segala soal urusan Partai dan revolusi. Melalui saluran<sup>2</sup> tersendiri itu pimpinan dapat mengambil langkah<sup>2</sup> politik dan organisasi termasuk penempatan kader, dan tidak djarang Politbiro hanja mensahkan langkah<sup>2</sup> jang sudah diambil oleh pimpinan itu, atau mempertimbangkan suatu soal dengan pengetahuan jang kurang lengkap dan mendalam mengenai persoalannya.

Kedua, adanya sikap kurang kritis baik dalam Politbiro, CC maupun badan<sup>2</sup> Partai lainnja terhadap pimpinan. Sudah mendjadi kelaziman, apa jang dikatakan pimpinan dianggap benar, dan tanpa melalui pendiskusan dan pemikiran jang mendalam, dilaksanakan. Sikap kurang kritis itu antara lain djuga diaobabkan karena lemahnja teori, jang menjebakkan kurang kuatnja landasan untuk menjangkal pendapat pimpinan bila dirasa pendapat itu keliru. Pada beberapa tahun belakangan, sesudah Partai menjusun grup

pekerdja teori, maka pemimpin<sup>2</sup> Partai pada umumnja makin terpisah dari persoalan<sup>2</sup> teori. Djika ada diskusi jang menjangkut persoalan teori, boleh dikata hanja pekerdja teori sadjalah jang mengambil bagian aktif. Ketjuali itu djuga ada kekurangan keberanian dalam menjatakan sikap jang tidak menjetudjui garis pimpinan.

Ketiga, dalam Partai telah ditanamkan kepertjajaan jang membesar<sup>2</sup>kan segi persatuan-bulat Partai. Se-olah<sup>2</sup> tak ada lagi perbedaan fikiran mengenai soal<sup>2</sup> prinsip. Karena itu dipandang sebagai sesuatu jang tidak normal bila ada perbedaan prinsip dengan pimpinan. Suasana demikian itu telah menimbulkan keengganan bagi kader<sup>2</sup> Partai untuk menjatakan setjara terbuka dan bebas fikiran dan perasaannja mengenai garis pimpinan jang dipandang tidak tepat. Sekalipun tidak setjara terbuka dan bebas serta tidak dinjatakan dalam forum<sup>2</sup> kolektif Partai, sebenarnja terdapat sedjumlah kader jang tidak menjetudjui garis politik dan organisasi pimpinan Partai jang oportunis atau revisionis itu. Akan tetapi fikiran dan perasaan kader<sup>2</sup> itu tidak mendapat tanggapan setjara baik dari pimpinan. Kekurangan kebebasan menjatakan fikiran dan perasaan kader<sup>2</sup> djuga dipengaruhi oleh adanja politik penempatan kader jang “pilih kasih” dan dalam batas<sup>2</sup> tertentu adanja isolasi terhadap kader<sup>2</sup> tertentu.

Dalam keadaan liberalisme menguasai garis organisasi Partai, maka tidak mungkin dilaksanakan langgam kerdja Partai, jaitu “memadukan teori dengan praktek, berhubungan erat dengan massa dan melakukan otokritik.” Dan tidak mungkin djuga dilaksanakan metode memimpin jang intinja adalah memadukan pimpinan dengan massa, jang harus dilaksanakan dengan atasan memberi tjontoh kepada bawahan.

Jang terdjadi bukan lagi pemaduan kebenaran umum Marxisme-Leninisme dengan praktek kongkrit revolusi Indonesia, tetapi mengkompromikan adjaran<sup>2</sup> Marxisme-Leninisme dengan pandangan burdjuasi; mensistematiskan serta mengembangkan pandangan dan teori burdjuasi; dan atas nama sembojan “meng-Indonesiakan Marxisme,” “mengembangkan Marxisme-Leninisme setjara kreatif,” mengubah Marxisme-Leninisme.

Garis berhubungan erat dengan massa, memadukan pimpinan

dengan massa, memang hanja dapat diwujudkan apabila dilaksanakan dengan konsekwen pengintegrasian diri dengan massa Rakjat, terutama dengan kaum buruh, buruh-tani dan tani-miskin. Dan dalam melaksanakan garis ini atasan harus memberi tjontoh kepada bawahan. Akan tetapi tidak demikian jang terdjadi. Banjak kader Partai, terutama kader<sup>2</sup> tinggi Partai, lebih khusus lagi jang memiliki ketjakaan<sup>2</sup> untuk memenuhi kebutuhan pekerdjaan di berbagai lembaga pemerintah dan semi-pemerintah, telah mentjapai taraf hidup jang djauh berbeda dari kaum buruh dan Rakjat pekerdja umumnja. Mereka telah menikmati fasilitas<sup>2</sup> seperti jang diperoleh pedjabat<sup>2</sup> tinggi pemerintah.

Dalam Partai bahkan telah berlaku konvensi, bahwa pemimpin<sup>2</sup> Partai dan pemimpin<sup>2</sup> organisasi massa revolusioner di pusat maupun di daerah harus mempunjai rangkapan djabat<sup>2</sup> resmi, supaja mendapat tambahan otoritet, supaja tidak hanja mendjadi tokoh Partai tetapi djuga tokoh berbagai golongan, tokoh nasional atau tokoh Rakjat sedaerah. Dengan berlakunja konvensi ini banjak pemimpin<sup>2</sup> Partai maupun ormas jang kegiatannja sebagian besar ditjuraahkan dalam lembaga<sup>2</sup> pemerintahan dan semi-pemerintah. Ini mengakibatkan berkurangnja perhatian jang ditudjukan kepada kehidupan Partai, baik di bidang ideologi maupun organisasi.

Di daerah<sup>2</sup> dan terutama di pusat tjara hidup sebagian pemimpin<sup>2</sup> Partai tidak lagi menjesuaikan diri dengan massa Rakjat jang masih menderita, tetapi menjesuaikan diri dengan burdjuasi. Ini semua dilakukan dengan predikat “sesuai dengan kebesaran Partai”, “mempertinggi martabat Partai”, “meninggalkan tjara kuno”, dsb. Bahkan diantara pemimpin<sup>2</sup> Partai sudah ada jang djatuh ke moral bedjat burdjuis jang menodai moral Komunis.

Dalam suasana seperti tersebut di atas tidak mungkin dilaksanakan pengintegrasian dengan massa Rakjat jang paling menderita. Seruan<sup>2</sup> “basmi puas diri,” “djadilah Komunis jang baik dan lebih baik lagi,” “pendidikan keluarga Komunis,” dsb, tidak lebih daripada tabir asap untuk menutupi kemunafikan dan kemerosotan moral di kalangan pimpinan Partai. Seruan<sup>2</sup> itu memang tidak ditudjukan kepada pimpinan. Se-olah<sup>2</sup> kader<sup>2</sup> di luar pimpinan sadjalah jang melakukan perbuatan<sup>2</sup> jang tidak sesuai dengan moral Komunis. Bersamaan dengan seruan<sup>2</sup> itu “tjara hidup burdjuis” terus berlangsung di kalangan pimpinan Partai.

Kader<sup>2</sup> daerah apabila melihat ke pusat bukannya menemukan keteladanan tentang kesederhanaan Komunis baik dalam kehidupan Partai maupun kehidupan pribadi, tetapi menemukan keteladanan tentang “kemewahan,” “kemodernan,” “kebesaran” Komunis baik dalam kehidupan Partai maupun dalam kehidupan pribadi pimpinan Partai tidak mendengarkan kritik<sup>2</sup> jang djudjur dari kawan<sup>2</sup> tertentu, tetapi menganggap kritik<sup>2</sup> itu sebagai “keterbelakangan,” “tidak menggunakan fasilitas setjara maksimal untuk kepentingan Partai dan Rakjat,” “tidak meninggikan martabat Partai,” dsb, dsb.

Demikianlah setjara pokok garis politik jang salah jang berkuasa dalam Partai telah diikuti oleh garis jang salah di lapangan organisasi jang merusak prinsip<sup>2</sup> partai Marxis-Leninis, merusak sendi<sup>2</sup> organisasi Partai jaitu sentralisme-demokrasi, merusak langgam kerdja dan metode memimpin Partai.

Untuk menegakkan PKI sebagai partai Marxis-Leninis harus dibongkar sampai keakar<sup>2</sup>nja liberalisme di lapangan organisasi dan sumber ideologi jang melahirkannja. PKI harus dibangun kembali sebagai partai tipe Lenin, partai jang dapat memenuhi tugasnja sebagai barisan depan dan bentuk organisasi klas jang tertinggi dari proletariat Indonesia, partai jang memikul tugas sedjarah memimpin massa Rakjat Indonesia untuk memenangkan revolusi anti-imperialisme, anti-feodalisme dan anti-kapitalisme-birokrasi menudju ke sosialisme. Partai jang demikian itu harus memiliki sjarat<sup>2</sup> ideologi: dipersendjatai dengan teori Marxisme-Leninisme dan bebas dari subjektivisme, oportuniste dan revisionisme modern; politik: memiliki program jang tepat termasuk program agraria revolusioner, menguasai masalah<sup>2</sup> strategi dan taktik revolusi Indonesia - menguasai bentuk perdjjuangan pokok jaitu perdjjuangan tani bersendjata dibawah pimpinan proletariat dan bentuk<sup>2</sup> perdjjuangan lainnja, dan pandai menggalang front persatuan revolusioner dari klas<sup>2</sup> dan golongan<sup>2</sup> anti-imperialisme dan anti-feodalisme berbasiskan persekutuan buruh dan tani dibawah pimpinan klas buruh; organisasi: kuat dan berakar dalam di kalangan massa Rakjat, terdiri dari anggota<sup>2</sup> Partai jang terpertjaja, berpengalaman dan terbadjukan dan mendjadi teladan dalam mendjalankan tugas<sup>2</sup> nasional.

Pembangunan kembali Partai dewasa ini kita lakukan dalam

keadaan berkuasanya rezim teror kontra-revolusioner yang paling kejam dan paling ganas. Legalitet Partai dan hak<sup>2</sup> kemanusiaan orang<sup>2</sup> Komunis sudah dirampas samasekali. Oleh karena itu Partai harus disusun dan bekerdja sepenuhnya setjara illegal. Dalam bekerdja sepenuhnya setjara ilegal, Partai harus pandai menggunakan setjara penuh kesempatan<sup>2</sup> yang dimungkinkan untuk melakukan kegiatan<sup>2</sup> setjara legal sesuai dengan keadaan, melakukan tjara<sup>2</sup> yang dapat diterima oleh massa untuk membangkitkan perdjuaan massa dan memininnja setingkat demi setingkat ke perdjuaan yang lebih tinggi.

Sudah terang bahwa dalam keadaan Partai harus sepenuhnya bekerdja setjara ilegal, tidak mungkin dilaksanakan setjara penuh sentralisme-demokrasi Partai, terutama demokrasi intern-Partai. Dalam keadaan demikian setiap badan pimpinan Partai harus berusaha keras untuk mengetahui dan mengurus setjara tepat fikiran dan perasaan anggota<sup>2</sup> Partai. Untuk itu harus didjalankan dengan konsekwen langgam kerdja, metode memimpin dan pimpinan kolektif Marxis-Leninis.

Dalam membangun kembali PKI yang Marxis-Leninis perhatian yang se-besar<sup>2</sup>nja harus ditjuraikan untuk membangun Partai di desa<sup>2</sup>, menggalang basis<sup>2</sup> revolusi.

Tugas membangun kembali partai Marxis-Leninis seperti tersebut di atas adalah pekerdjaan yang berat dan penuh bahaya serta memakan waktu lama, karena itu harus didjalankan dengan berani, tekun, teliti, sabar dan ulet.

## D J A L A N K E L U A R

Setelah mengetahui kelemahan<sup>2</sup> dan kesalahan<sup>2</sup> Partai dalam periode sesudah tahun 1951 seperti telah dibentangkan di muka, dan yang telah menimbulkan kerusakan<sup>2</sup> berat pada PKI dan gerakan revolusioner Rakjat Indonesia, djelaslah bahwa tugas mendesak yang dihadapi oleh Marxis-Leninis Indonesia dewasa ini, pertama ialah membangun kembali PKI sebagai partai Marxis-Leninis yang bersih dari subjektivisme, oportuniste dan revisionisme modern.

Untuk membangun kembali partai Marxis-Leninis sedemikian itu,



kader<sup>2</sup> Partai di semua tingkat dan kemudian anggota<sup>2</sup> Partai, harus mentjapai kebulatan fikiran mengenai kesalahan<sup>2</sup> Partai di waktu jang lalu dan mengenai djalan baru jang harus ditempuh.

Sebagai akibat pukulan teror putih ketiga Partai telah kehilangan banjak kader jang mempunjai pengalaman lama dalam pekerdjaan Partai dan pekerdjaan gerakan massa revolusioner. Meskipun demikian, apabila telah ditjapai kebulatan fikiran, mengenai kesalahan<sup>2</sup> pokok Partai di waktu jang lalu dan djalan baru jang harus ditempuh dari kader<sup>2</sup> jang kini masih ada, akan dapat ditegakkan setapak demi setapak pimpinan jang stabil di semua tingkat, Sang akan sanggup memenuhi tugasnja memimpin Partai dan Rakjat Indonesia mengatasi kesulitan demi kesulitan selama meradjalelanja kontra-revolusi dan surutnja gelombang revolusi, serta membawa maju setindak demi setindak perjuangan Rakjat, dan achirnja, memimpin pasang gelombang revolusi jang pasti datang.

Untuk mentjapai kebulatan fikiran itu perlu diadakan gerakan pembetulan fikiran di seluruh Partai. Dengan gerakan pembetulan fikiran kita bermaksud untuk mengubah fikiran jang salah di masa jang lampau menjadi fikiran jang benar. Untuk dapat menempuh djalan jang benar adalah mutlak harus meninggalkan djalan jang salah. Tidak mungkin menempuh djalan jang benar apabila djalan jang salah tidak ditinggalkan sama sekali.

Dalam situasi dewasa ini tidak mudah untuk mentjapai kebulatan fikiran mengenai semua kesalahan di masa jang lalu sampai pada soal jang se-ketjil<sup>2</sup>nja. Tetapi jang mutlak perlu ialah kebulatan fikiran mengenai soal<sup>2</sup> jang pokok seperti jang dibentangkan di dalam otokritik ini. Tanpa memahami masalah<sup>2</sup> pokok itu, seseorang kawan tidak akan dapat mengambil bagian didalam memikul tugas besar, berat tetapi mulia, jaitu menegakkan partai Marxis-Leninis Indonesia sebagai djaminan adanja pimpinan jang terpertjaja atas Revolusi Demokrasi Rakjat Indonesia.

Sebagaimana telah dianalisa di muka, kesalahan<sup>2</sup> oportunist dan revisionis di lapangan politik dan organisasi Partai jang kita koreksi ini bukan hanja hasil dari sjarat<sup>2</sup> sosial dan sedjarah pada masa dasawarsa terachir sadja, tetapi djuga mempunjai akar jang lebih djauh lagi, pada sjarat<sup>2</sup> sosial dan sedjarah sedjak berdirinja Partai

kita. Oleh karena itu sama sekali tidak boleh ada anggapan bahwa soalnya sudah beres setelah dilakukan kritik dan otokritik ini. Djika ideologi subjektivisme belum dilikwidasi dari dalam Partai, apalagi djika masih ada di dalam pimpinan Partai, selama itu Partai tidak akan terhindar dari kesalahan<sup>2</sup> oportuniste kanan atau oportuniste “kiri,” karena Partai tidak akan mungkin menganalisa situasi politik setjara tepat dan tidak akan mungkin memberikan petunjuk kerdja setjara tepat pula. Adalah pertama-tama mendjadi kewadajiban pimpinan dan kader<sup>2</sup> Central, kemudian pimpinan dan kader<sup>2</sup> Daerah di semua tingkat untuk dengan segala daja dan sepenuh hati memerangi subjektivisme.

Subjektivisme hanja dapat dilawan setjara efektif dan dilikwidasi apabila seluruh Partai ditingkatkan kemampuannya untuk membedakan antara ideologi proletar dengan ideologi burdjuis ketjill serta dikembangkannya kritik dan otokritik. Meningkatkan kemampuan seluruh Partai untuk membedakan antara ideologi proletar dengan ideologi burdjuis ketjil hanja mungkin ditjapai dengan memperdalam pendidikan Marxisme-Leninisme. Partai harus mendidik anggota<sup>2</sup>nja untuk mentrapkan metode Marxis-Leninis dalam menganalisa situasi politik dan menilai kekuatan<sup>2</sup> klas jang ada, sehingga tidak dilakukan analisa dan penilaian jang subjektif. Partai harus membawa perhatian para anggotanya kepada penelitian dan mempeladjadi keadaan sosial dan ekonomi sehingga bisa menenturan taktik<sup>2</sup> perdjuaan dan metode kerdjanya membantu anggota<sup>2</sup>nja sehingga memahami bahwa tanpa penelitian sjarat<sup>2</sup> aktuil mereka akan terdjerumus ke dalam fantasi.

Timbulnja kesedaran atas kesalahan<sup>2</sup> Partai di waktu jang lalu merupakan sjarat jang sangat baik untuk memahami djiwa revolusioner Marxisme-Leninisme. Oleh karena itu kaum Marxis-Leninis Indonesia harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengatasi kesulitan<sup>2</sup> jang ditimbulkan oleh teror putih dewasa ini bagi usaha<sup>2</sup> mempeladjadi Marxisme-Leninisme.

Pengalaman perdjuaan Partai selama masa<sup>2</sup> jang silam menundjukkan betapa pentingnja bagi kaum Marxis-Leninis Indonesia jang bertekad untuk mempertahankan Marxisme-Leninisme dan melawan revisionisme modern, untuk selain mempelajari ajaran<sup>2</sup> Marx, Engels, Lenin dan Stalin, djuga setjara khusus mempeladjadi fikiran<sup>2</sup> Mao Tjetung, jang telah berhasil

setjara tjemerlang dalam mewarisi, mempertahankan dan mengembangkan Marxisme-Leninisme sampai ke puntjaknja pada zaman sekarang.

PKI hanja akan dapat mengibarkan tinggi<sup>2</sup> pandji Marxisme-Leninisme apabila bersikap tegas dalam melawan revisionisme modern jang dewasa ini berpusat pada grup pimpinan PKUS. Melawan revisionisme modern tidak mungkin dilakukan sambil terus memelihara persahabatan dengan kaum revisionis modern. PKI harus meninggalkan sikapnja jang salah rnengenai hubungan dengan kaum revisionis modern di masa jang lalu. Kesetiaan terhadap internasionalisme proletar hanja mungkin diwujudkan dengan sikap jang tak kenal ampun dalam melawan revisionisme modern, karena revisionisme modern merusak internasionalisme proletar, mengchianati perjuangn proletariat dan Rakjat tertindas seluruh dunia.

Dalam membangun kembali Partai kaum Marxis-Leninis Indonesia harus mengarahkan perhatiannja untuk mentjiptakan sjarat<sup>2</sup> guna memimpin revolusi agraria kaum tani bersendjata jang akan merupakan bentuk pokok perjuangn untuk memenangkan Revolusi Demokrasi Rakjat Indonesia. Ini berarti bahwa perhatian terbesar harus ditjurahtkan untuk membangun kembali organisasi<sup>2</sup> Partai di desa. Perhatian terbesar harus ditjurahtkan untuk memetjahkan masalah membangkitkan, mengorganisasi, dan memobilisasi kaum tani dalam revolusi agraria anti-feodal. Pengintegrasian Partai dengan kaum tani terutama dengan buruh-tani dan tani-miskin harus sungguh<sup>2</sup> diwujudkan. Karena hanja melalui pengintegrasian inilah Partai dapat memimpin kaum tani dan kaum tani akan sanggup mendjadi benteng Revolusi Demokrasi Rakjat jang tak terkalahkan.

Sebagai akibat pukulan teror putih ketiga, organisasi<sup>2</sup> Partai di desa pada umumnja mengalami kerusakan lebih berat, sehingga bekerdja di desa lebih sukar dan lebih berat. Tetapi ini tidak mengubah kebenaran hukum bahwa Revolusi Demokrasi Rakjat Indonesia kekuatan utamanja adalah kaum tani, dan daerah basisnja adalah desa. Dengan bartekad bulat, se-gala<sup>2</sup>nja untuk massa Rakjat,-kaum Marxis-Lenninis Indonesia pasti dapat mengatasi kesulitan<sup>2</sup> jang berat itu. Dengan sepenuhnja pertjaja kepada massa, bersandar kepada massa, kaum Marxis-Leninia In-

donesia pasti dapat mengubah desa<sup>2</sup> Indonesia jang terbelakang mendjadi benteng<sup>2</sup> revolusi jang besar dan terkonsolidasi baik setjara militer, politik dan kebudajaan.

Kaum tani Indonesia paling berkepentingan atas Revolusi Demokrasi Rakjat. Karena hanja revolusi inilah jang akan membebaskan mereka dari hidup jang terbelakang dan serba pintjang sebagai akibat penindasan feodal. Hanja revolusi inilah jang akan memberikan kepada kaum tani sesuatu jang di-idam<sup>2</sup>kan di sepanjang hidup dan untuk hidupnja, jaitu tanah. Oleh karena itu betapapun berat dan ber-liku<sup>2</sup>nja, kaum tani pasti menempuh djalan revolusi untuk tanah dan kebebasan.

Djelaslah bahwa tugas kedua kaum Marxis-Leninis Indonesia sekarang jalah mentjiptakan sjarat<sup>2</sup> jang diperlukan bagi revolusi agraria bersendjata kaum tani dibawah pimpinan proletariat. Djika kaum Marxis-Leninis Indonesia berhasil membangkitkan, mengorganisasi dan memobilisasi kaum tani untuk melakukan revolusi agraria anti-feodal, maka terdjamilah kepemimpinan klas buruh atas Revolusi Demokrasi Rakyat, dan terdjamil pula kemenangannja.

Meskipun demikian, Partai harus tetap berusaha untuk [...] satuan revolusioner dengan klas<sup>2</sup> dan golongan<sup>2</sup> anti-imperialis [...] feodalisme lainnja. Atas dasar persekutuan buruh dan tani dibawah [...] buruh, Partai harus berusaha menarik kaum burdjuis ketjil [...] demokratis lainnja, dan harus pula menarik burdjuasi nasional [...] tambahan dalam Revolusi Demokrasi Rakjat. Sjarat objektif [...] kan digalanggja front persatuan revolusioner jang luas.

Diktatur militer djendral<sup>2</sup> kanan AD Nasution-Suharto tidak [...] djelmaan kekuasaan klas<sup>2</sup> jang paling reaksioner di dalam negeri [...] komprador, kapitalis-birokrat dan tuan-tanah. Klas<sup>2</sup> reaksioner [...] dibenggoli oleh klik djendral<sup>2</sup> kanan AD mendjalankan diktatur [...] Indonesia, bertindak sebagai andjing pendjaga kepentingan imperialis [...] imperialisme AS di Indonesia. Oleh karena itu berkuasannja diktatur militer djendral<sup>2</sup> kanan AD pasti memperhebat penindasan dan penghisapan imperialisme dan feodalisme atas Rakjat Indonesia.

Diktatur militer djendral<sup>2</sup> kanan AD hanja mewakili kepentingan

minoritas jang sangat ketjil dan menindas majoritet jang sangat besar Rakjat Indonesia. Oleh karena itu diktatur militer djendral<sup>2</sup> kanan AD pasti mendapat perlawanan dari massa Rakjat luas. Diktatur militer klik djendral<sup>2</sup> kanan AD djuga tidak mewakili massa pradjurit dari Angkatan Bersendjata RI. Oleh karena itu perlawanan terhadap diktatur militer djendral<sup>2</sup> kanan AD djuga timbul dari kalangan pradjurit. Djelaslah bahwa dalam perjuangan untuk menghantjurkan diktatur militer djendral<sup>2</sup> kanan AD terdapat kemungkinan menggalang front jang sangat luas.

Situasi sekarang berbeda dari situasi pada waktu teror putih kedua (provokasi Madiun). Sekarang tidak seluruh kekuatan tengah ikut bersama kontra-revolusi memukul kekuatan<sup>2</sup> penggerak revolusi. Sajap kiri kekuatan tengah karena djuga mendjadi sasaran pukulan kontra-revolusi, melakukan perlawanan. Makin lama makin luas golongan tengah jang melawan diktatur militer djendral<sup>2</sup> kanan AD. Partai harus terus menggalang front persatuan dengan kekuatan ini.

Djadi tugas urgen ketiga jang dihadapi kaum Marxis Leninis Indonesia adalah menggalang front persatuan revolusioner dengan klas<sup>2</sup> dan golongan<sup>2</sup> anti-imperialis dan anti-feodal atas dasar persekutuan buruh dan tani dibawah pimpinan klas buruh.

Dengan demikian djelaslah bahwa untuk memenangkan Revolusi Demokrasi Rakjat kaum Marxis-Leninis Indonesia harus mengibarkan tinggi<sup>2</sup> tripandji Partai jaitu:

Pandji pertama, pembangunan partai Marxis-Leninis jang bebas dari subjektivisme, oportuniste dan revisionisme modern.

Pandji kedua, perjuangan Rakjat bersendjata jang hakikatnja perjuangan kaum tani bersendjata untuk revolusi agraria anti-feodal dibawah pimpinan klas buruh.

Pandji ketiga, front persatuan revolusioner atas dasar persekutuan buruh dan tani dibawah pimpinan klas buruh.

Demikianlah Politbiro telah melakukan otokritik atas kelemahan<sup>2</sup> dan kesalahan<sup>2</sup> berat Partai dalam periode sesudah tahun 1951 jang telah menimbulkan kerugian<sup>2</sup> berat pada Partai dan seluruh

gerakan revolusioner.

Tugas<sup>2</sup> jang dihadapi kaum Marxis-Leninis Indonesia amat berat. Mereka harus bekerdja dalam keadaan di-kedjar<sup>2</sup> teror jang paling ganas dan paling kedjam jang tak ada taranja dalam sedjarah. Akan tetapi kaum Marxis-Leninis Indonesia tidak ragu<sup>2</sup> bahwa dengan mengkoreksi kesalahan<sup>2</sup> Partai pada masa jang telah lalu mereka kini sedang menempuh djalan jang benar, djalan Revolusi Demokrasi Rakjat. Betapapun pandjang, ber-liku<sup>2</sup> dan banjak kesulitan, inilah satu<sup>2</sup>nja djalan menudju ke Indonesia Baru jang bebas dan demokratis, Indonesia jang sungguh<sup>2</sup> mendjadi milik Rakjat Indonesia. Untuk mana harus berani menempuh djalan pandjang.

Kaum Marxis-Leninis dan kaum revolusioner Indonesia berdasarkan pengalaman perjuangannya sendiri tidak ragu<sup>2</sup> akan kebenaran tesis Kawan Mao Tjetung, bahwa kaum imperialis dan kaum reaksioner adalah matjan kertas. Nampaknja sadja mereka menakutkan, tetapi sebenarnya mereka lemah. Ditinjau dari pandangan jang djauh Rakjatlah jang sesungguhnya kuat. Diktatur militer djendral<sup>2</sup> kanan AD jang kini berkuasa adalah djuga matjan kertas. Nampaknja sadja mereka kuat dan menakutkan, tetapi mereka sebenarnya lemah, karena tidak didukung bahkan ditentang oleh Rakjat dan di dalamnja sendiri penuh dengan kontradiksi, saling berebut rezeki dan kekuasaan. Kaum imperialis terutama imperialis AS jang mendjadi sandaran diktatur militer djendral<sup>2</sup> kanan AD adalah djuga matjan kertas. Nampaknja sadja mereka itu kuat dan menakutkan, tetapi sebenarnya mereka lemah dan sedang menudju keruntuhannya. Kelemahan kaum imperialis, chususnja imperialis AS ditundjukkan oleh ketidak-mampuan mereka menundukkan Rakjat Vietnam jang heroik dan ketidak-mampuan mereka membendung gelombang perjuangan anti-imperialisme Rakjat sedunia, termasuk di AS sendiri jang sedang menerdjang dengan dahsjat.

Ditinjau dari strategi, kaum imperialis dan kaum reaksioner lainnya adalah lemah, dan karena itu kita harus meremehkannya. Dengan meremehkan musuh setjara strategi dapat ditimbulkan keberanian untuk melawannya dan kejakinan untuk mengalahkannya. Bersamaan dengan itu, kita harus mengindahkan musuh, memperhitungkan sepenuhnya kekuatan mereka didalam

taktik, dan tidak melakukan tindakan<sup>2</sup> avonturir terhadap mereka.

Sekarang kita berada dalam zaman dimana imperialisme sedang mengalami keruntuhan setjara total, dan sosialisme sedang menudju kemenangan di seluruh dunia. Tidak ada kekuatan jang dapat mentjegah keruntuhan total imperialisme dan kaum reaksioner lainnja, dan tidak ada kekuatan jang dapat menahan kemenangan sosialisme di seluruh dunia. Diktatur militer djendral<sup>2</sup> kanan AD sebagai andjing pendjaga kepentingan imperialisme di Indonesia djuga tak akan dapat menghindarkan diri dari keruntuhannya. Pembunuhan dan penjiksaan setjara kedjam dan biadab terhadap ratusan ribu Komunis dan demokrat dan jang sampai sekarang terus mereka lakukan, tidak akan dapat membendung kebangkitan dan perlawanan Rakjat beserta kaum Komunis. Sebaliknya segala kekedjaman dan kebiadaban itu pasti menimbulkan perlawanan setimpal dari Rakjat. Kaum Komunis akan menebus pengorbanan ratusan ribu kawan itu dengan tekad untuk lebih baik lagi mengabdikan kepada Rakjat, revolusi dan Partai.

Kaum Marxis-Leninis Indonesia jang sedang menderita pukulan teror putih ketiga menjatakan rasa terimakasih jang se-dalam<sup>2</sup>nja atas solidaritet kaum Marxis-Leninis seluruh dunia. Solidaritet itu meneguhkan kejakinan kaum revolusioner Indonesia tentang tak terpisahkannya perdjjuangan pembebasan nasional mereka dengan perdjjuangan proletariat internasional untuk sosialisme. Kaum Marxis-Leninis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi harapan<sup>2</sup> terbaik kaum Marxis-Leninis sedunia, untuk dengan teguh mempertahankan Marxisme-Leninisme dan melawan revisionisme modern, bekerdja lebih baik untuk pembebasan Rakjat dan negerinja serta untuk revolusi proletar sedunia.

Kaum Marxis-Leninis Indonesia jang bersatupadu dalam fikiran dan bertekad untuk menempuh djalan revolusi, dengan pertjaja sepenuhnya pada Rakjat, bersandar pada Rakjat, bekerdja dengan berani, tekun, teliti, sabar, ulet dan waspada, pasti akan dapat memenuhi tugas sedjarahnja, memimpin Revolusi Demokrasi Rakjat, menghantjurkan diktatur militer djendral<sup>2</sup> kanan AD dan membangun kekuasaan jang samasekali baru, jaitu Diktatur Demokrasi Rakjat. Dengan Diktatur Demokrasi Rakjat, jaitu kekuasaan bersama klas<sup>2</sup> don golongan<sup>2</sup> anti-imperialis dan anti-feodal dibawah pimpinan klas buruh, Rakjat Indonesia akan

melenjapkan sampai ke-akar<sup>2</sup>nja imperialisme dan sisa<sup>2</sup> feodalisme serta membangun masjarakat baru jang bebas dan demokratis, menudju ke sosialisme, dimana tiada penindasan dan penghisapan oleh manusia atas manusia lainnja.

Marilah kita bersatupadu menempuh djalan revolusi, jang diterangi oleh adjaran<sup>2</sup> Marxisme-Leninisme, djalan bagi pembebasan proletariat dan Rakjat-Indonesia menudju ke sosialisme.

POLITBIRO CC PKI

Djawa Tengah, September 1966

o o o o o o o